BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2025

- § LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- § NERACA SKPD
- § LAPORAN OPERASIONAL (LO)
- § LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
- § CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



0778-460014

sekre.dispendakepri@gmail.com/dispenda.kepriprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau** yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD, Neraca SKPD, Laporan Operasinal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan SKPD secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LK Tahun 2025 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Bendahara SKPD.

Batam, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ABDULLAH, S.Sos, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012101993031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan danakuntabel. Setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir, sesuai Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 295 ayat (1), (2),(3) dan (4) bahwa masing-masing SKPD harus menyajikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran yang berkenaan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan Keuangan ini merupakan perwujudan kewajiban dari instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi Laporan Keuangan ini meliputi Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD berupa Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD, Neraca SKPD, Laporan Operasional (LO) SKPD, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LaporanKeuangan yang disajikan dapat kami sampaikansebagai berikut:

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan perhatian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan PAD. APBD TA 2025 telah bekerja keras untuk melanjutkan dukungan pada Program yang tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Bapenda serta mampu berperan sebagai *shock absorber* dalam sector penguatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Di dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2025, Bapenda Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas dan pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan upaya perbaikan sepanjang tahun 2025, antara lain:

a. Menyempurnakan sistem pelaporan keuangan dengan implementasi secara menyeluruh pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan (SIPD-RI, CMS Aplikasi Bank Riau Kepri Syariah).
b. Melakukan pembinaan kepada seluruh pejabat pengelola/penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat meminimalkan temuan berulang seperti temuan terkait pengelolaan kas, penatausahaan Barang Milik Daerah, serta penganggaran dan pelaksanaan anggaran.
c. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, Inspektorat dan melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya, agar secara komprehensif dan efektif dapat mengatasi substansi permasalahan, sehingga tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang.

Disamping semua capaian yang dilaporkan pada tahun 2025, kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, sehingga laporan keuangan di masa mendatang akan menjadi semakin berkualitas. Semoga Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Batam, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABDULLAH, S.Sos, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012101993031004

DAFTAR ISI

RINGKASAN vii
1. Laporan Realisasi Anggaran viii
2. Neraca SKPD xvii
3. Laporan Operasional xx
4. Laporan Perubahan Ekuitas xxix
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) xxx

BAB I PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
B. Periode Pelaporan Keuangan 3
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan 3
D. Dasar Hukum 3
E. Sistematika Penulisan 5

BAB II PROFIL SKPD
A. Sumber Daya SKPD 7
B. Strategi dan Arah Kebijakan 34
C. Program dan Kegiatan 40

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025
3.1 Pencapaian Target Pendapatan 60
3.2 Pencapaian Kinerja Belanja SKPD 66
3.3 Hambatan dan Kendala yg Ada Dalam Pencapaian Target 89

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
A. Entitas Akuntansi SKPD 92
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan 92
C. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 92
D. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ... 93
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 94
F. Kebijakan Akuntansi Belanja 94
G. Kebikakan Akuntansi Persediaan..... 95
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 97
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 98

BAB V PENJELASAN POS-POS NERACA
A. Laporan Realisasi Anggaran 100
B. Neraca 114
1. Aset 114
2. Kewajiban..... 120
3. Ekuitas Dana..... 121
4. Laporan Operasional 122

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 133
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Entitas 134

BAB VII PENUTUP 140
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Bapenda 10
2.2 Struktur Organisasi UPTD PPD Tipe A 29
2.3 Struktur Organisasi UPTD PPD Tipe B 30
3.1 Target dan Realisasi Pendapatan 61
3.2 Perbandingan realisasi pendapatan daerah 61
3.3 Perbandingan realisasi PAD 64
3.4 Matrik Evaluasi Sektor daerah 65
3.5 Perbandingan realisasi PKB & BBNKB 65
3.6 Trend Realisasi Belanja 67
3.7 Perbandingan realisasi Anggaran Belanja 68

BAB II

2.1 Pegawai Bapenda Menurut Eselon 31
2.2 Pegawai Bapenda Jenjang Pendidikan 31
2.3 Pegawai Bapenda Menurut Struktur Organisasi 32
2.4 Aset Berdasarkan Status Kepemilikan 33
2.5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Berdasarkan Kondisi 33
2.6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapenda 35
2.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 41
2.8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan Realisasi TA 2024 42
2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 43
2.10 Target Kinerja Bapenda TA 2025 44

BAB III

3.1 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2025 61
3.2 Pencapaian Kinerja Belanja TA 2025 62

BAB V

5.1 Pendapatan LRA TA 2025 100
5.2 Rincian Pendapatan Pajak Daerah 101
5.3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 102
5.4 Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah 103
5.5 Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 103
5.6 Rincian Belanja Pegawai 104
5.7 Rincian Belanja Barang/Jasa 106
5.8 Rincian Belanja Modal 112
5.9 Aset Tetap Bapenda 117
5.10 Rincian Kewajiban 120
5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LO 122
5.12 Rincian Pendapatan Pajak Daerah -LO 123
5.13 Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah-LO 124
5.14 Rincian Beban-LO 125
5.15 Rincian Beban Pegawai 126
5.16 Rincian Beban Barang/Jasa 128
5.17 Rincian Beban Penyisihan Piutang 132
5.18 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 132

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah Tahun Anggaran 2025 berakhir, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempersiapkan Laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 dan disampaikan untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan penyajian Laporan Keuangan SKPD merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNTUK TAHUNYANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**	**1.793.639.631.181,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**	**1.792.346.931.181,00**
4.1.01	Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	13.628.420.459,00	9.139.165.550,00	67,06	14.600.867.857,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.437.883.339,00	8.990.055.846,00	66,90	14.312.861.463,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	82.625.024,00	50.305.594,00	60,88	119.311.461,00
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	27.179.835,00	24.523.392,00	90,23	50.812.925,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	80.732.261,00	74.280.718,00	92,01	117.882.008,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.098.158.236,00	54.929.599.391,00	91,40	83.223.828.443,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	59.844.173.820,00	54.698.375.997,00	91,40	82.841.464.510,00
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	92.782.458,00	72.701.028,00	78,36	141.134.300,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	161.201.958,00	158.522.366,00	98,34	241.229.633,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	255.241.949.229,00	224.538.883.977,00	87,97	331.714.934.959,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	254.210.987.612,00	223.355.743.744,00	87,86	330.170.949.178,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	135.811.561,00	116.059.559,00	85,46	194.320.419,00
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	317.808.557,00	321.503.217,00	101,16	467.427.600,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	577.341.499,00	745.577.457,00	129,14	882.237.762,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	295.571.190,00	262.625.008,00	88,85	418.264.750,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	148.351.442,00	138.792.073,00	93,56	205.321.325,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	128.997.805,00	106.653.823,00	82,68	177.792.925,00
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	2.299.486,00	3.976.206,00	172,92	3.976.500,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	15.922.457,00	13.202.906,00	82,92	31.174.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	2.191.996.115,00	2.842.714.059,00	129,69	3.286.105.834,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.956.433.552,00	2.655.323.642,00	135,72	2.946.660.101,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	105.838.670,00	83.035.601,00	78,45	156.236.525,00
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	43.779.334,00	36.893.991,00	84,27	64.110.900,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	85.944.559,00	67.460.825,00	78,49	119.098.308,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.802.045.999,00	12.908.463.294,00	100,83	18.472.453.052,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	12.456.651.903,00	12.569.799.541,00	100,91	17.951.831.556,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	45.600.043,00	28.605.679,00	62,73	65.533.725,00
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	107.993.098,00	106.942.188,00	99,03	164.662.917,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	191.800.955,00	203.115.886,00	105,90	290.424.854,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.992.265.696,00	9.160.009.032,00	91,67	14.290.426.591,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	9.465.204.509,00	8.850.228.720,00	93,50	13.505.715.891,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	443.162.338,00	262.394.035,00	59,21	669.550.200,00
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	42.869.489,00	22.650.608,00	52,84	57.096.000,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	41.029.360,00	24.735.669,00	60,29	58.064.500,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	11.909.285.005,00	11.572.695.951,00	97,17	17.226.016.705,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	9.169.543.426,00	9.278.893.427,00	101,19	13.309.594.755,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2.595.174.012,00	2.162.389.321,00	83,32	3.710.846.450,00
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	56.618.967,00	46.421.298,00	81,99	81.607.500,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	87.948.600,00	84.991.905,00	96,64	123.968.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	865.146.629,00	884.247.652,00	102,21	1.237.085.451,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	849.295.428,00	873.612.240,00	102,86	1.214.230.659,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	823.526,00	0,00	0,00	1.067.600,00
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	9.475.507,00	3.195.734,00	33,73	14.589.492,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	5.552.168,00	7.439.678,00	134,00	7.197.700,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	76.989.415.721,00	78.977.952.537,00	102,58	111.475.255.121,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	76.823.119.621,00	78.818.323.271,00	102,60	111.232.415.762,00
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	47.875.951,00	49.285.900,00	102,95	69.785.259,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	118.420.149,00	110.343.366,00	93,18	173.054.100,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	95.525.315,00	91.326.140,00	95,60	136.645.175,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	83.430.295,00	80.653.072,00	96,67	118.170.475,00
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.669.132,00	2.172.594,00	81,40	4.773.200,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	9.425.888,00	8.500.474,00	90,18	13.701.500,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.011.372.531,00	3.971.040.400,00	98,99	5.386.600.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	49.163.641.161,00	30.316.626.800,00	61,66	64.727.747.500,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	216.024.538.321,00	137.745.131.100,00	63,76	283.363.435.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	261.210.867,00	122.397.700,00	46,86	378.975.000,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.788.168.053,00	4.276.193.700,00	239,14	2.602.425.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.983.236.208,00	8.080.919.200,00	89,96	11.545.050.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.366.461.912,00	2.487.726.400,00	73,90	4.335.870.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	5.597.758.761,00	7.591.358.000,00	135,61	7.391.990.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	359.563.296,00	610.246.200,00	169,72	505.800.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	109.737.561.110,00	78.084.468.000,00	71,16	142.115.939.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	278.899.798,00	194.630.100,00	69,78	362.807.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	240.882.197.402,00	282.523.757.628,00	117,29	255.059.527.531,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	237.570.178.722,00	207.226.406.049,00	87,23	235.545.667.011,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [(],MBLB],	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00	71.775.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00	71.775.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00	71.775.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00	71.775.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.771.041,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.561.041,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.955.066.122,21	9.948.896.000,00	71,29	14.542.181.200,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	293.421.299,00	191.734.700,00	65,34	364.564.700,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.477.024.239,00	998.666.700,00	67,61	1.775.942.100,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	7.340.221.407,21	5.031.246.400,00	68,54	7.228.404.700,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.187.720.274,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	0,00	2.770.900,00	0,00	7.833.700,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	7.535.147,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	649.143.756,00	38.527.200,00	5,94	55.134.300,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	0,00	348.611.700,00	0,00	504.236.700,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	0,00	134.098.300,00	0,00	258.806.800,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	0,00	241.980.100,00	0,00	236.019.900,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	0,00	23.421.200,00	0,00	38.360.700,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	0,00	2.936.643.200,00	0,00	4.070.233.900,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	0,00	1.195.600,00	0,00	2.643.700,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.787.600,00	2.837.900,00	101,80	0,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2.787.600,00	1.506.000,00	54,02	0,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	496.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	484.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	351.900,00	0,00	0,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00	666.093,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00	666.093,00
4.1.04.12.18	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00
4.1.04.12.18.0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.1.04.13.02.0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**	**1.792.346.931.181,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	**97,78**	**1.292.700.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	**97,78**	**1.292.700.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**	**1.793.639.631.181,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**110.833.568.573,00**	**106.746.671.893,75**	**96,31**	**115.930.186.890,20**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**108.701.582.312,00**	**105.312.995.774,75**	**96,88**	**112.209.144.780,20**
5.1.01	Belanja Pegawai	70.897.568.462,47	70.191.130.509,00	99,00	75.978.849.916,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.644.959.889,92	19.290.557.261,00	98,20	13.711.559.643,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	14.521.106.379,03	14.399.183.500,00	99,16	9.922.338.150,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	10.048.754.019,03	9.973.714.700,00	99,25	9.922.338.150,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.472.352.360,00	4.425.468.800,00	98,95	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.431.524.684,00	1.383.594.616,00	96,65	1.050.358.218,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.068.831.325,00	1.058.340.442,00	99,02	1.050.358.218,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	362.693.359,00	325.254.174,00	89,68	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	503.580.000,00	497.840.000,00	98,86	499.260.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	503.580.000,00	497.840.000,00	98,86	499.260.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	210.955.454,00	207.244.000,00	98,24	206.966.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	210.955.454,00	207.244.000,00	98,24	206.966.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	597.540.105,04	587.975.000,00	98,40	316.060.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	308.810.099,00	304.230.000,00	98,52	316.060.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	288.730.006,04	283.745.000,00	98,27	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	910.418.007,00	880.120.260,00	96,67	610.573.020,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	614.070.942,00	606.662.340,00	98,79	610.573.020,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	296.347.065,00	273.457.920,00	92,28	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.106.934,00	9.764.914,00	64,64	13.362.576,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.106.934,00	9.764.914,00	64,64	13.362.576,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	442.461,97	242.503,00	54,81	141.453,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	233.780,00	133.460,00	57,09	141.453,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	208.681,97	109.043,00	52,25	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.278.895.476,87	1.200.422.050,00	93,86	1.010.753.258,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.074.021.170,87	999.018.161,00	93,02	1.010.753.258,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	204.874.306,00	201.403.889,00	98,31	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.377.089,01	31.042.905,00	98,93	20.436.664,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.642.887,00	20.421.232,00	98,93	20.436.664,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10.734.202,01	10.621.673,00	98,95	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	94.130.025,00	93.127.513,00	98,93	61.310.304,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	61.928.905,00	61.263.955,00	98,93	61.310.304,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	32.201.120,00	31.863.558,00	98,95	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	49.883.274,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	49.883.274,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	51.252.608.572,55	50.900.573.248,00	99,31	25.986.783.493,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.159.130.938,00	14.987.215.957,00	98,87	14.946.861.121,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.159.130.938,00	14.987.215.957,00	98,87	14.946.861.121,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.433.016.998,00	1.412.717.581,00	98,58	1.423.198.717,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.433.016.998,00	1.412.717.581,00	98,58	1.423.198.717,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.696.349.614,00	9.617.624.590,00	99,19	9.616.723.655,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.696.349.614,00	9.617.624.590,00	99,19	9.616.723.655,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.964.111.022,55	24.883.015.120,00	99,68	0,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	8.864.802.989,28	8.835.118.721,00	99,67	0,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.168.387.756,00	5.165.704.270,00	99,95	0,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.203.407.147,00	10.161.640.029,00	99,59	0,00
5.1.01.02.06.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	727.513.130,27	720.552.100,00	99,04	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	36.280.506.780,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	34.609.488.780,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	13.315.589.697,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	11.354.921.446,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.938.977.637,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.671.018.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.662.858.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.804.013.849,53	35.123.458.265,75	92,91	36.230.294.864,20
5.1.02.01	Belanja Barang	10.566.031.475,20	9.564.456.391,00	90,52	7.161.651.592,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.566.031.475,20	9.564.456.391,00	90,52	7.157.651.592,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	472.318.700,00	298.664.000,00	63,23	836.760.790,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.268.170,00	2.947.550,00	90,19	8.204.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.485.212.000,00	1.459.042.100,00	98,24	1.435.820.500,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	54.305.150,00	52.915.000,00	97,44	65.951.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	2.557.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	62.419.000,00	62.057.500,00	99,42	38.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	443.949.430,00	390.913.364,00	88,05	358.974.770,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	411.045.388,00	378.919.910,00	92,18	363.819.025,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.986.108.835,00	4.725.119.533,00	94,77	1.245.270.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	48.186.400,00	47.870.000,00	99,34	61.530.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	85.292.777,20	64.814.425,00	75,99	37.236.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	673.495.826,00	586.363.975,00	87,06	477.093.165,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	214.945.192,00	182.509.280,00	84,91	194.404.742,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	136.568.543,00	120.686.684,00	88,37	104.376.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	2.847.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	256.950.324,00	187.368.770,00	72,92	269.765.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.952.000,00	17.082.980,00	95,16	106.750.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.541.300,00	1.980.760,00	55,93	2.610.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	940.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	470.910.000,00	335.391.900,00	71,22	588.721.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00	1.620.000,00	67,50	17.609.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	538.855.000,00	457.714.000,00	84,94	521.213.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.500.000,00	92.710.000,00	95,09	116.620.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	85.057.440,00	83.778.660,00	98,50	166.950.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.750.000,00	13.986.000,00	88,80	67.610.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	30.497.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	11.840.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	20.012.666.851,63	18.959.388.674,75	94,74	21.607.569.507,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.886.956.301,26	13.971.352.887,00	93,85	16.881.564.422,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	87.305.000,00	71.605.000,00	82,02	92.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	563.350.000,00	512.600.000,00	90,99	835.850.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.300.000,00	25.000.000,00	98,81	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.412.672.236,96	4.307.722.749,00	97,62	8.857.380.338,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	298.332.935,68	277.463.272,00	93,00	368.309.616,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.593.358.252,00	1.590.435.832,00	99,82	1.002.198.534,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	140.202.765,62	123.400.000,00	88,02	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	51.473.220,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.222.300,00	1.495.300,00	35,41	1.764.500,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	276.134.400,00	237.600.000,00	86,05	132.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.578.710.000,00	1.433.715.500,00	90,82	1.726.584.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	160.800.000,00	150.556.891,00	93,63	79.119.205,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	124.686.344,00	101.465.096,00	81,38	79.854.363,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.560.658.189,00	2.373.982.361,00	92,71	2.471.635.882,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	61.380.000,00	59.400.000,00	96,77	69.883.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.285.316.590,00	1.085.469.866,00	84,45	1.053.361.458,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	1.522.306,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	84.840.016,00	68.425.748,00	80,65	57.828.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.594.288.000,00	1.515.616.000,00	95,07	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.102.248,00	6.102.248,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	20.967.024,00	20.967.024,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	854.133.855,33	824.729.144,75	96,56	626.692.491,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	244.397.634,59	236.149.666,00	96,63	509.465.617,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.659.669,85	14.068.113,00	95,96	30.439.238,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.891.635,89	17.671.787,00	93,54	38.049.171,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	576.184.915,00	556.839.578,75	96,64	48.738.465,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	338.746.740,00	329.867.000,00	97,38	326.380.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	59.200.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	1.485.000,00	49,50	9.780.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.276.000,00	2.697.000,00	82,33	0,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	8.200.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	6.770.740,00	3.385.000,00	49,99	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	320.000.000,00	319.100.000,00	99,72	249.200.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.496.443.400,00	1.459.464.000,00	97,53	685.871.333,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.401.403.400,00	1.364.604.000,00	97,37	492.638.333,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	71.280.000,00	71.160.000,00	99,83	57.942.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	23.760.000,00	23.700.000,00	99,75	135.291.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	110.000.000,00	56.550.000,00	51,41	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	110.000.000,00	56.550.000,00	51,41	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	89.133.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	79.133.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.314.236.555,04	2.305.275.643,00	99,61	2.985.928.261,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	708.505.538,00	706.100.282,00	99,66	1.085.682.815,00
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.680.919,00	620.262.230,00	99,93	937.864.536,00
5.1.02.02.13.0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	920.002.219,00	914.082.928,00	99,36	962.380.910,00
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	65.047.879,04	64.830.203,00	99,67	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.724.734.322,70	3.492.087.466,00	93,75	2.821.080.457,20
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.434.689.338,00	1.270.617.896,00	88,56	988.285.232,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.940.000,00	15.940.000,00	100,00	31.880.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.140.000,00	0,00	0,00	18.503.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	731.246.000,00	631.970.328,00	86,42	466.425.800,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.530.000,00	44.180.800,00	84,11	65.857.100,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	150.000.000,00	148.300.000,00	98,87	83.628.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.812.170,00	22.735.000,00	95,48	30.810.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	30.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	248.641.668,00	242.414.768,00	97,50	195.526.332,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	153.379.500,00	126.077.000,00	82,20	64.905.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.290.044.984,70	2.221.469.570,00	97,01	1.832.795.225,20
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.017.250.304,70	1.985.669.570,00	98,43	1.703.195.225,20
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	272.794.680,00	235.800.000,00	86,44	129.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.167.731.200,00	2.774.675.734,00	87,59	4.639.993.308,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.167.731.200,00	2.774.675.734,00	87,59	4.639.993.308,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.858.619.400,00	2.478.525.734,00	86,70	3.316.026.933,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309.111.800,00	296.150.000,00	95,81	1.306.390.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	17.576.375,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	332.850.000,00	332.850.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	332.850.000,00	332.850.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	332.850.000,00	332.850.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**108.701.582.312,00**	**105.312.995.774,75**	**96,88**	**112.209.144.780,20**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.131.986.261,00**	**1.433.676.119,00**	**67,25**	**3.721.042.110,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.096.233.261,00	1.401.871.119,00	66,88	3.596.242.110,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	633.820.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	633.820.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	568.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.444.200,00	4.203.000,00	77,20	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.570.800,00	2.553.000,00	71,50	0,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.570.800,00	2.553.000,00	71,50	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.873.400,00	1.650.000,00	88,08	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.873.400,00	1.650.000,00	88,08	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	890.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	890.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	890.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	669.924.794,00	539.170.620,00	80,48	1.231.077.110,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	136.526.000,00	11.932.500,00	8,74	83.750.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	108.891.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.635.000,00	11.932.500,00	43,18	83.750.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	472.693.794,00	466.533.120,00	98,70	197.203.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	49.122.082,00	47.523.120,00	96,74	105.410.500,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	413.234.896,00	410.463.000,00	99,33	55.435.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	8.090.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.336.816,00	8.547.000,00	82,69	22.768.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.705.000,00	60.705.000,00	100,00	950.123.610,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	47.115.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	60.705.000,00	60.705.000,00	100,00	40.440.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	845.568.610,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.564.400,00	22.000.000,00	89,56	329.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	265.110.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	13.310.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	251.800.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	14.564.400,00	12.000.000,00	82,39	7.700.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.564.400,00	12.000.000,00	82,39	7.700.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.396.299.867,00	836.497.499,00	59,91	1.381.680.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	764.157.000,00	386.311.499,00	50,55	801.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	725.157.000,00	386.311.499,00	53,27	801.300.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	632.142.867,00	450.186.000,00	71,22	580.380.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	35.790.000,00	35.790.000,00	100,00	109.185.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	319.024.900,00	146.534.000,00	45,93	423.565.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	119.523.720,00	119.305.000,00	99,82	35.730.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	157.804.247,00	148.557.000,00	94,14	11.900.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	12.675.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	12.675.000,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	12.675.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	2.601.000,00	2.575.000,00	99,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	33.152.000,00	29.230.000,00	88,17	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.131.986.261,00**	**1.433.676.119,00**	**67,25**	**3.721.042.110,00**
	JUMLAH BELANJA	**110.833.568.573,00**	**106.746.671.893,75**	**96,31**	**115.930.186.890,20**
	SURPLUS/DEFISIT	**1.537.523.448.455,21**	**1.367.744.549.771,87**	**88,96**	**1.677.709.444.290,80**

Batam, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABDULLAH, S.Sos, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012101993031004

Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan perbandingan antara Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2025 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 1.474.491.221.665,62** atau mencapai **89,45%** dari target yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp **1.648.357.017.028,21**. Sedangkan Realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 106.746.671.893,75** atau mencapai **96,31%** dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar **Rp 110.833.568.573,00**. Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Presentase	**Anggaran 2025**	**Realisasi**	**%**
Pendapatan	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**
Pendapatan Asli Daerah	1.647.032.914.528,21	1.473.196.519.665,62	89,45
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.324.192.500,00	1.294.704.000,00	97,78
Belanja	**110.833.568.573,00**	**106.746.671.893,75**	**96,31**
Belanja Operasi	108.701.582.312,00	105.312.995.774,75	96,88
Belanja Modal	2.131.986.261,00	1.433.676.119,00	67,25

2. NERACA SKPD

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025. Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 106.774.965.676,80 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 53.388.772.018,59, Aset Tetap sebesar Rp. 53.450.995.009,21 Piutang Pajak Daerah sebesar Rp. 99.618.122.631,00, Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp. 18.157.290.883,12, Beban dibayar dimuka sebesar Rp. 0,00, jumlah persediaan Rp. 0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 64.801.351,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.785.768.826,50 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek Badan Pendapatan Daerah. Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah memiliki utang atas belanja sebesar Rp. 1.083.668.630,00 Dengan demikian, jumlah/nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 108.713.573.287,30. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 111.499.342.113,80

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Neraca Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU		
	Badan Pendapatan Daerah		
	Neraca		
	TAHUN ANGGARAN 2025		
	1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2024		
			Dalam Rupiah
Kode Rekening	**Uraian**	**2025**	**2024**
1	**ASET**	**106.774.965.676,80**	**108.640.131.360,79**
1.1	**ASET LANCAR**	**53.388.772.018,59**	**53.387.179.018,59**
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	99.618.122.631,00	99.618.122.631,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.157.290.883,12	18.157.290.883,12
1.1.10	Penyisihan Piutang	(64.386.641.495,53)	(64.386.641.495,53)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	435.384.624,99
1.1.12	Persediaan	0,00	2.728.028.160,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**53.388.772.018,59**	**56.555.184.803,58**
1.3	**ASET TETAP**	**53.450.995.009,21**	**52.178.755.260,21**
1.3.01	Tanah	8.962.550.572,00	8.962.550.572,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	56.801.480.568,95	55.529.240.819,95
1.3.03	Gedung dan Bangunan	41.738.650.488,00	41.738.650.488,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.358.823.900,00	1.358.823.900,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	75.639.000,00	75.639.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(55.486.149.519,74)	(55.486.149.519,74)
	JUMLAH ASET TETAP	**53.450.995.009,21**	**52.178.755.260,21**

1.5	**ASET LAINNYA**	**(64.801.351,00)**	**(93.808.703,00)**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	144.946.649,00	113.141.649,00
1.5.04	Aset Lain-lain	49.123.000,00	51.920.648,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(258.871.000,00)	(258.871.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**(64.801.351,00)**	**(93.808.703,00)**
	JUMLAH ASET	**106.774.965.678,80**	**108.640.131.360,79**
2	**KEWAJIBAN**	**2.785.768.826,50**	**7.021.227.550,50**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**2.785.768.826,50**	**7.021.227.550,50**
2.1.06	Utang Belanja	1.083.668.630,00	5.319.127.354,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.785.768.826,50	1.702.100.196,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**2.785.768.826,50**	**7.021.227.550,50**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**2.785.768.826,50**	**7.021.227.550,50**
3	**EKUITAS**	**108.713.573.287,30**	**105.048.576.247,29**
3.1	**EKUITAS**	**108.747.773.287,30**	**105.048.576.247,29**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	1.370.120.640.459,88	1.657.46.152.813,58
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(1.366.455.643.419,87)	(1.676.417.269.290,80)
	JUMLAH EKUITAS	**108.713.573.287,30**	**105.048.576.247,29**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**111.499.342.113,80**	**112.069.803.797,79**
		Provinsi Kepulauan Riau, 20-01-2026	
		Kepala Badan Pendapatan Daerah	
			
		ABDULLAH, S.Sos, M.H.	
		NIP.197012101993031004	
Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri			

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.474.491.221.665,62 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 1.473.196.517.665,62 Pendapatan pajak daerah-LO sebesar Rp.1.447.285.058,50 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO sebesar Rp.1.294.704.000,00. Realisasi Pendapatan –LO periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan (18,24) persen atau sebesar Rp.(328.850.052.404,38) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024).

Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Rp.1.370.120.640.459,88. Surplus/Defisit-LO tahun 2025 merupakan nilai penyusunan pertama dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025 dan tahun anggaran 2024. Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	%
Pendapatan	**1.474.491.221.665,62**	**1.803.341.274.070,00**	**(328.850.052.404,38)**	**(18,24)**
Pendapatan Asli Daerah LO	1.473.196.517.665,62	1.801.782.319.988,00	(328.585.802.322,38)	(18,24)
Pajak Daerah- LO	1.447.285.058.158,50,00	1.787.142.204.747,00	(339.857.146.588,50)	(19,02)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO	1.294.704.000,00	1.558.954.082,00	(264.250.082,00)	(16,95)
Beban	**104.370.581.205,74**	**145.873.121.256,42**	**(41.502.540.050,68)**	**(28,45)**
Beban Operasi	104.370.581.205,74	140.284.756.824,88	(35.914.175.619,14)	(25,60)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	5.588.364.431,54	5.588.364.431,54	(100,00)
(Surplus / Defisit) LO	**1.370.120.640.459,88**	**1.657.468.152.813,58**	**(287.347.512.353,70)**	**(17,34)**

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	1.474.491.221.665,62	1.803.341.274.070,00	(328.850.052.404,38)	(18,24)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.473.196.517.665,62	1.801.782.319.988,00	(328.585.802.322,38)	(18,24)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	1.447.285.058.158,50	1.787.142.204.747,00	(339.857.146.588,50)	(19,02)
7.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	405.307.682.591,00	597.786.505.146,00	(192.478.822.555,00)	(32,20)
7.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	9.139.165.550,00	16.305.489.065,00	(7.166.323.515,00)	(43,95)
7.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO	8.990.055.846,00	16.017.482.671,00	(7.027.426.825,00)	(43,87)
7.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO	50.305.594,00	119.311.461,00	(69.005.867,00)	(57,84)
7.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat--LO	24.523.392,00	50.812.925,00	(26.289.533,00)	(51,74)
7.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO	74.280.718,00	117.882.008,00	(43.601.290,00)	(36,99)
7.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	54.929.599.391,00	83.223.828.443,00	(28.294.229.052,00)	(34,00)
7.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO	54.698.375.997,00	82.841.464.510,00	(28.143.088.513,00)	(33,97)
7.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat--LO	72.701.028,00	141.134.300,00	(68.433.272,00)	(48,49)
7.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah-LO	158.522.366,00	241.229.633,00	(82.707.267,00)	(34,29)
7.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	224.538.883.977,00	331.714.934.959,00	(107.176.050.982,00)	(32,31)
7.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO	223.355.743.744,00	330.170.949.178,00	(106.815.205.434,00)	(32,35)
7.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO	116.059.559,00	194.320.419,00	(78.260.860,00)	(40,27)
7.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat --LO	321.503.217,00	467.427.600,00	(145.924.383,00)	(31,22)
7.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO	745.577.457,00	882.237.762,00	(136.660.305,00)	(15,49)
7.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	262.625.008,00	418.264.750,00	(155.639.742,00)	(37,21)
7.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi-LO	138.792.073,00	205.321.325,00	(66.529.252,00)	(32,40)
7.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum-LO	106.653.823,00	177.792.925,00	(71.139.102,00)	(40,01)
7.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat-LO	3.976.206,00	3.976.500,00	(294,00)	(0,01)
7.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah--LO	13.202.906,00	31.174.000,00	(17.971.094,00)	(57,65)
7.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus-LO	2.842.714.059,00	3.286.105.834,00	(443.391.775,00)	(13,49)
7.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO	2.655.323.642,00	2.946.660.101,00	(291.336.459,00)	(9,89)
7.1.01.01.05.0002	PKB--Mobil Bus-Bus-Umum-LO	83.035.601,00	156.236.525,00	(73.200.924,00)	(46,85)
7.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO	36.893.991,00	64.110.900,00	(27.216.909,00)	(42,45)
7.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO	67.460.825,00	119.098.308,00	(51.637.483,00)	(43,36)
7.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	12.908.463.294,00	18.472.453.052,00	(5.563.989.758,00)	(30,12)
7.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO	12.569.799.541,00	17.951.831.556,00	(5.382.032.015,00)	(29,98)
7.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum-LO	28.605.679,00	65.533.725,00	(36.928.046,00)	(56,35)
7.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat--LO	106.942.188,00	164.662.917,00	(57.720.729,00)	(35,05)
7.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO	203.115.886,00	290.424.854,00	(87.308.968,00)	(30,06)
7.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	9.160.009.032,00	14.290.426.591,00	(5.130.417.559,00)	(35,90)
7.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi--LO	8.850.228.720,00	13.505.715.891,00	(4.655.487.171,00)	(34,47)
7.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum--LO	262.394.035,00	669.550.200,00	(407.156.165,00)	(60,81)
7.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat-LO	22.650.608,00	57.096.000,00	(34.445.392,00)	(60,33)
7.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah-LO	24.735.669,00	58.064.500,00	(33.328.831,00)	(57,40)
7.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	11.572.695.951,00	17.226.016.705,00	(5.653.320.754,00)	(32,82)
7.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO	9.278.893.427,00	13.309.594.755,00	(4.030.701.328,00)	(30,28)
7.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO	2.162.389.321,00	3.710.846.450,00	(1.548.457.129,00)	(41,73)
7.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat--LO	46.421.298,00	81.607.500,00	(35.186.202,00)	(43,12)
7.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO	84.991.905,00	123.968.000,00	(38.976.095,00)	(31,44)
7.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	884.247.652,00	1.237.085.451,00	(352.837.799,00)	(28,52)
7.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi--LO	873.612.240,00	1.214.230.659,00	(340.618.419,00)	(28,05)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum--LO	0,00	1.067.600,00	(1.067.600,00)	(100,00)
7.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat-LO	3.195.734,00	14.589.492,00	(11.393.758,00)	(78,10)
7.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah-LO	7.439.678,00	7.197.700,00	241.978,00	3,36
7.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua--LO	78.977.952.537,00	111.475.255.121,00	(32.497.302.584,00)	(29,15)
7.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO	78.818.323.271,00	111.232.415.762,00	(32.414.092.491,00)	(29,14)
7.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO	49.285.900,00	69.785.259,00	(20.499.359,00)	(29,37)
7.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO	110.343.366,00	173.054.100,00	(62.710.734,00)	(36,24)
7.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga--LO	91.326.140,00	136.645.175,00	(45.319.035,00)	(33,17)
7.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi--LO	80.653.072,00	118.170.475,00	(37.517.403,00)	(31,75)
7.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO	2.172.594,00	4.773.200,00	(2.600.606,00)	(54,48)
7.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO	8.500.474,00	13.701.500,00	(5.201.026,00)	(37,96)
7.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)--LO	273.480.737.600,00	533.667.908.500,00	(260.187.170.900,00)	(48,75)
7.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	3.971.040.400,00	16.337.870.000,00	(12.366.829.600,00)	(75,69)
7.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	3.971.040.400,00	16.337.870.000,00	(12.366.829.600,00)	(75,69)
7.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	30.316.626.800,00	64.727.747.500,00	(34.411.120.700,00)	(53,16)
7.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	30.316.626.800,00	64.727.747.500,00	(34.411.120.700,00)	(53,16)
7.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	137.745.131.100,00	283.363.435.000,00	(145.618.303.900,00)	(51,39)
7.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	137.745.131.100,00	283.363.435.000,00	(145.618.303.900,00)	(51,39)
7.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	122.397.700,00	378.975.000,00	(256.577.300,00)	(67,70)
7.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	122.397.700,00	378.975.000,00	(256.577.300,00)	(67,70)
7.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus--LO	4.276.193.700,00	2.602.425.000,00	1.673.768.700,00	64,32
7.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	4.276.193.700,00	2.602.425.000,00	1.673.768.700,00	64,32
7.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	8.080.919.200,00	11.545.050.000,00	(3.464.130.800,00)	(30,01)
7.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	8.080.919.200,00	11.545.050.000,00	(3.464.130.800,00)	(30,01)
7.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	2.487.726.400,00	4.335.870.000,00	(1.848.143.600,00)	(42,62)
7.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	2.487.726.400,00	4.335.870.000,00	(1.848.143.600,00)	(42,62)
7.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	7.591.358.000,00	7.391.990.000,00	199.368.000,00	2,70
7.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	7.591.358.000,00	7.391.990.000,00	199.368.000,00	2,70
7.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	610.246.200,00	505.800.000,00	104.446.200,00	20,65
7.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	610.246.200,00	505.800.000,00	104.446.200,00	20,65
7.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	78.084.468.000,00	142.115.939.000,00	(64.031.471.000,00)	(45,06)
7.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	78.084.468.000,00	142.115.939.000,00	(64.031.471.000,00)	(45,06)
7.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	194.630.100,00	362.807.000,00	(168.176.900,00)	(46,35)
7.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	194.630.100,00	362.807.000,00	(168.176.900,00)	(46,35)
7.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	489.750.163.677,00	487.387.122.941,00	2.363.040.736,00	0,48
7.1.01.03.01	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	282.523.757.628,00	251.841.455.930,00	30.682.301.698,00	12,18
7.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	282.523.757.628,00	251.841.455.930,00	30.682.301.698,00	12,18
7.1.01.03.02	PBBKB Bahan Bakar Solar--LO	207.226.406.049,00	235.545.667.011,00	(28.319.260.962,00)	(12,02)
7.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	207.226.406.049,00	235.545.667.011,00	(28.319.260.962,00)	(12,02)
7.1.01.04	Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	1.192.208.723,00	31.824.973.353,00	2.669,41
7.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	1.192.208.723,00	31.824.973.353,00	2.669,41
7.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan-LO	33.017.182.076,00	1.192.208.723,00	31.824.973.353,00	2.669,41
7.1.01.05	Pajak Rokok--LO	174.288.290.965,00	167.108.459.437,00	7.179.831.528,00	4,30
7.1.01.05.01	Pajak Rokok-LO	174.288.290.965,00	167.108.459.437,00	7.179.831.528,00	4,30
7.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok-LO	174.288.290.965,00	167.108.459.437,00	7.179.831.528,00	4,30
7.1.01.17	Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	0,00	614.336.352,00	100,00
7.1.01.17.01	Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	0,00	614.336.352,00	100,00
7.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat-LO	614.336.352,00	0,00	614.336.352,00	100,00
7.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	0,00	70.826.664.897,50	100,00
7.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	0,00	70.826.664.897,50	100,00
7.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	70.826.664.897,50	0,00	70.826.664.897,50	100,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	52.980.000,00	71.775.000,00	(18.795.000,00)	(26,19)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	52.980.000,00	71.775.000,00	(18.795.000,00)	(26,19)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	52.980.000,00	71.775.000,00	(18.795.000,00)	(26,19)
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	52.980.000,00	71.775.000,00	(18.795.000,00)	(26,19)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	25.858.479.507,12	14.568.340.241,00	11.290.139.266,12	77,50
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	25.858.479.507,12	14.568.130.241,00	11.290.349.266,12	77,50
7.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	9.948.896.000,00	14.539.750.400,00	(4.590.854.400,00)	(31,57)
7.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	0,00	(2.430.800,00)	2.430.800,00	(100,00)
7.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO	191.734.700,00	364.564.700,00	(172.830.000,00)	(47,41)
7.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO	998.666.700,00	1.775.942.100,00	(777.275.400,00)	(43,77)
7.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO	5.031.246.400,00	7.228.404.700,00	(2.197.158.300,00)	(30,40)
7.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi-LO	2.770.900,00	7.833.700,00	(5.062.800,00)	(64,63)
7.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO	38.527.200,00	55.134.300,00	(16.607.100,00)	(30,12)
7.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO	348.611.700,00	504.236.700,00	(155.625.000,00)	(30,86)
7.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi-LO	134.098.300,00	258.806.800,00	(124.708.500,00)	(48,19)
7.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO	241.980.100,00	236.019.900,00	5.960.200,00	2,53
7.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi-LO	23.421.200,00	38.360.700,00	(14.939.500,00)	(38,94)
7.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO	2.936.643.200,00	4.070.233.900,00	(1.133.590.700,00)	(27,85)
7.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-LO	1.195.600,00	2.643.700,00	(1.448.100,00)	(54,78)
7.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.837.900,00	0,00	2.837.900,00	100,00
7.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	100,00
7.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	496.000,00	0,00	496.000,00	100,00
7.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	484.000,00	0,00	484.000,00	100,00
7.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	351.900,00	0,00	351.900,00	100,00
7.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	91.312.431,00	27.713.748,00	63.598.683,00	229,48
7.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	91.312.431,00	27.713.748,00	63.598.683,00	229,48
7.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	15.782.762.058,12	666.093,00	15.782.095.965,12	2.369.353,22
7.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO	15.782.762.058,12	666.093,00	15.782.095.965,12	2.369.353,22
7.1.04.12.18	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	32.671.118,00	0,00	32.671.118,00	100,00
7.1.04.12.18.0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	32.671.118,00	0,00	32.671.118,00	100,00
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	210.000,00	(210.000,00)	(100,00)
7.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	210.000,00	(210.000,00)	(100,00)
7.1.04.13.02.0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO	0,00	210.000,00	(210.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**1.473.196.517.665,62**	**1.801.782.319.988,00**	**(328.585.802.322,38)**	**(18,24)**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**1.294.704.000,00**	**1.558.954.082,00**	**(264.250.082,00)**	**(16,95)**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	1.294.704.000,00	1.558.954.082,00	(264.250.082,00)	(16,95)
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	266.254.082,00	(266.254.082,00)	(100,00)
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	266.254.082,00	(266.254.082,00)	(100,00)
7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	266.254.082,00	(266.254.082,00)	(100,00)
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.294.704.000,00	1.292.700.000,00	2.004.000,00	0,16
7.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.294.704.000,00	1.292.700.000,00	2.004.000,00	0,16
7.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.294.704.000,00	1.292.700.000,00	2.004.000,00	0,16
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**1.294.704.000,00**	**1.558.954.082,00**	**(264.250.082,00)**	**(16,95)**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.474.491.221.665,62**	**1.803.341.274.070,00**	**(328.850.052.404,38)**	**(18,24)**
8	**BEBAN**	**104.370.581.205,74**	**145.873.121.256,42**	**(41.502.540.050,68)**	**(28,45)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**104.370.581.205,74**	**140.284.756.824,88**	**(35.914.175.619,14)**	**(25,60)**
8.1.01	Beban Pegawai	70.191.130.509,00	75.976.186.869,00	(5.785.056.360,00)	(7,61)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	19.290.557.261,00	13.708.896.596,00	5.581.660.665,00	40,72
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	14.399.183.500,00	9.922.338.150,00	4.476.845.350,00	45,12
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	9.973.714.700,00	9.922.338.150,00	51.376.550,00	0,52
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	4.425.468.800,00	0,00	4.425.468.800,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.383.594.616,00	1.048.300.570,00	335.294.046,00	31,98
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.058.340.442,00	1.048.300.570,00	10.039.872,00	0,96
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	325.254.174,00	0,00	325.254.174,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	497.840.000,00	499.260.000,00	(1.420.000,00)	(0,28)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	497.840.000,00	499.260.000,00	(1.420.000,00)	(0,28)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	207.244.000,00	206.966.000,00	278.000,00	0,13
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	207.244.000,00	206.966.000,00	278.000,00	0,13
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	587.975.000,00	316.060.000,00	271.915.000,00	86,03
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	304.230.000,00	316.060.000,00	(11.830.000,00)	(3,74)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	283.745.000,00	0,00	283.745.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	880.120.260,00	610.573.020,00	269.547.240,00	44,15
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	606.662.340,00	610.573.020,00	(3.910.680,00)	(0,64)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	273.457.920,00	0,00	273.457.920,00	100,00
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.764.914,00	12.757.177,00	(2.992.263,00)	(23,46)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.764.914,00	12.757.177,00	(2.992.263,00)	(23,46)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	242.503,00	141.453,00	101.050,00	71,44
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	133.460,00	141.453,00	(7.993,00)	(5,65)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	109.043,00	0,00	109.043,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.200.422.050,00	1.010.753.258,00	189.668.792,00	18,77
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	999.018.161,00	1.010.753.258,00	(11.735.097,00)	(1,16)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	201.403.889,00	0,00	201.403.889,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.042.905,00	20.436.664,00	10.606.241,00	51,90
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.421.232,00	20.436.664,00	(15.432,00)	(0,08)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10.621.673,00	0,00	10.621.673,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	93.127.513,00	61.310.304,00	31.817.209,00	51,90
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	61.263.955,00	61.310.304,00	(46.349,00)	(0,08)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	31.863.558,00	0,00	31.863.558,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	50.900.573.248,00	25.986.783.493,00	24.913.789.755,00	95,87
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.987.215.957,00	14.946.861.121,00	40.354.836,00	0,27
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.987.215.957,00	14.946.861.121,00	40.354.836,00	0,27
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.412.717.581,00	1.423.198.717,00	(10.481.136,00)	(0,74)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.412.717.581,00	1.423.198.717,00	(10.481.136,00)	(0,74)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.617.624.590,00	9.616.723.655,00	900.935,00	0,01
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.617.624.590,00	9.616.723.655,00	900.935,00	0,01
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.883.015.120,00	0,00	24.883.015.120,00	100,00
8.1.01.02.06.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	8.835.118.721,00	0,00	8.835.118.721,00	100,00
8.1.01.02.06.0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.165.704.270,00	0,00	5.165.704.270,00	100,00
8.1.01.02.06.0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.161.640.029,00	0,00	10.161.640.029,00	100,00
8.1.01.02.06.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan	720.552.100,00	0,00	720.552.100,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	36.280.506.780,00	(36.280.506.780,00)	(100,00)
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	34.609.488.780,00	(34.609.488.780,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	13.315.589.697,00	(13.315.589.697,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	11.354.921.446,00	(11.354.921.446,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.03.01.0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	9.938.977.637,00	(9.938.977.637,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	1.671.018.000,00	(1.671.018.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	1.662.858.000,00	(1.662.858.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	33.649.433.696,74	40.091.542.290,99	(6.442.108.594,25)	(16,07)
8.1.02.01	Beban Barang	9.501.421.485,00	9.251.139.118,00	250.282.367,00	2,71
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	9.501.421.485,00	9.216.879.118,00	284.542.367,00	3,09
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	44.605.000,00	868.340.790,00	(823.735.790,00)	(94,86)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.947.550,00	8.204.400,00	(5.256.850,00)	(64,07)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.459.042.100,00	1.435.820.500,00	23.221.600,00	1,62
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	52.915.000,00	65.951.000,00	(13.036.000,00)	(19,77)
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	2.557.000,00	(2.557.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	62.057.500,00	38.400.000,00	23.657.500,00	61,61
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	686.807.424,00	445.407.330,00	241.400.094,00	54,20
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	364.278.810,00	444.772.925,00	(80.494.115,00)	(18,10)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.346.724.367,00	2.981.555.766,00	1.365.168.601,00	45,79
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	47.870.000,00	62.060.000,00	(14.190.000,00)	(22,86)
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	112.774.425,00	50.776.800,00	61.997.625,00	122,10
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	832.146.475,00	572.288.665,00	259.857.810,00	45,41
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	145.265.080,00	233.265.942,00	(88.000.862,00)	(37,73)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	122.544.684,00	103.697.500,00	18.847.184,00	18,18
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	2.847.000,00	(2.847.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	23.280.000,00	(23.280.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	371.658.770,00	87.215.000,00	284.443.770,00	326,14
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.082.980,00	110.880.000,00	(93.797.020,00)	(84,59)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.980.760,00	3.078.000,00	(1.097.240,00)	(35,65)
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	940.000,00	(940.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	325.391.900,00	598.721.500,00	(273.329.600,00)	(45,65)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.620.000,00	17.609.000,00	(15.989.000,00)	(90,80)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	313.234.000,00	665.693.000,00	(352.459.000,00)	(52,95)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	92.710.000,00	116.620.000,00	(23.910.000,00)	(20,50)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	83.778.660,00	166.950.000,00	(83.171.340,00)	(49,82)
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	13.986.000,00	67.610.000,00	(53.624.000,00)	(79,31)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	0,00	30.497.000,00	(30.497.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0078	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	11.840.000,00	(11.840.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	34.260.000,00	(34.260.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0118	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	13.565.000,00	(13.565.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0133	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	450.000,00	(450.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0409	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	8.865.000,00	(8.865.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0410	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	8.580.000,00	(8.580.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	18.096.613.849,74	22.831.854.569,79	(4.735.240.720,05)	(20,74)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	13.358.249.887,00	17.494.667.422,00	(4.136.417.535,00)	(23,64)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.605.000,00	92.800.000,00	(21.195.000,00)	(22,84)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	509.600.000,00	838.850.000,00	(329.250.000,00)	(39,25)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	4.307.722.749,00	8.857.380.338,00	(4.549.657.589,00)	(51,37)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	178.463.272,00	467.309.616,00	(288.846.344,00)	(61,81)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.415.102.832,00	1.177.531.534,00	237.571.298,00	20,18
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	123.400.000,00	0,00	123.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	51.473.220,00	(51.473.220,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.495.300,00	1.764.500,00	(269.200,00)	(15,26)
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	171.600.000,00	198.000.000,00	(26.400.000,00)	(13,33)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.182.815.500,00	1.977.484.000,00	(794.668.500,00)	(40,19)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	150.556.891,00	79.119.205,00	71.437.686,00	90,29
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	101.465.096,00	79.854.363,00	21.610.733,00	27,06
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.373.982.361,00	2.471.635.882,00	(97.653.521,00)	(3,95)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	59.400.000,00	69.883.000,00	(10.483.000,00)	(15,00)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.066.599.866,00	1.072.231.458,00	(5.631.592,00)	(0,53)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	1.530.000,00	1.522.306,00	7.694,00	0,51
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	68.425.748,00	57.828.000,00	10.597.748,00	18,33
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1.515.616.000,00	0,00	1.515.616.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0087	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.102.248,00	0,00	6.102.248,00	100,00
8.1.02.02.01.0088	Beban jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	20.967.024,00	0,00	20.967.024,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	563.317.694,75	888.103.941,00	(324.786.246,25)	(36,57)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	236.149.666,00	509.465.617,00	(273.315.951,00)	(53,65)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.068.113,00	30.439.238,00	(16.371.125,00)	(53,78)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.671.787,00	38.049.171,00	(20.377.384,00)	(53,56)
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	295.428.128,75	310.149.915,00	(14.721.786,25)	(4,75)
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	12.150.000,00	12.000.000,00	150.000,00	1,25
8.1.02.02.03.0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.150.000,00	12.000.000,00	150.000,00	1,25
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	314.267.000,00	341.980.000,00	(27.713.000,00)	(8,10)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	59.200.000,00	(59.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.485.000,00	9.780.000,00	(8.295.000,00)	(84,82)
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.200.000,00	8.200.000,00	(5.000.000,00)	(60,98)
8.1.02.02.04.0058	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	303.500.000,00	264.800.000,00	38.700.000,00	14,61
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.486.803.624,99	1.020.041.945,79	466.761.679,20	45,76
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.391.943.624,99	826.808.945,79	565.134.679,20	68,35
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	71.160.000,00	57.942.000,00	13.218.000,00	22,81
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	23.700.000,00	135.291.000,00	(111.591.000,00)	(82,48)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	56.550.000,00	0,00	56.550.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	56.550.000,00	0,00	56.550.000,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	89.133.000,00	(89.133.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	79.133.000,00	(79.133.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.305.275.643,00	2.985.928.261,00	(680.652.618,00)	(22,80)
8.1.02.02.14.0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	706.100.282,00	1.085.682.815,00	(379.582.533,00)	(34,96)
8.1.02.02.14.0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.262.230,00	937.864.536,00	(317.602.306,00)	(33,86)
8.1.02.02.14.0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	914.082.928,00	962.380.910,00	(48.297.982,00)	(5,02)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.14.0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	64.830.203,00	0,00	64.830.203,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	2.978.072.628,00	3.369.295.295,20	(391.222.667,20)	(11,61)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.021.561.228,00	1.237.341.900,00	(215.780.672,00)	(17,44)
8.1.02.03.02.0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	47.820.000,00	(47.820.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	18.503.000,00	(18.503.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	518.264.328,00	580.131.800,00	(61.867.472,00)	(10,66)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.630.800,00	68.407.100,00	(26.776.300,00)	(39,14)
8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	148.300.000,00	83.628.000,00	64.672.000,00	77,33
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.925.000,00	32.620.000,00	(11.695.000,00)	(35,85)
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	39.000.000,00	30.750.000,00	8.250.000,00	26,83
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	162.564.100,00	275.377.000,00	(112.812.900,00)	(40,97)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	90.877.000,00	100.105.000,00	(9.228.000,00)	(9,22)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.956.511.400,00	2.131.953.395,20	(175.441.995,20)	(8,23)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.751.311.400,00	1.937.553.395,20	(186.241.995,20)	(9,61)
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	205.200.000,00	194.400.000,00	10.800.000,00	5,56
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.773.082.734,00	4.639.253.308,00	(1.866.170.574,00)	(40,23)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.773.082.734,00	4.639.253.308,00	(1.866.170.574,00)	(40,23)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.476.932.734,00	3.315.286.933,00	(838.354.199,00)	(25,29)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	296.150.000,00	1.306.390.000,00	(1.010.240.000,00)	(77,33)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	17.576.375,00	(17.576.375,00)	(100,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	332.850.000,00	0,00	332.850.000,00	100,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	332.850.000,00	0,00	332.850.000,00	100,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	332.850.000,00	0,00	332.850.000,00	100,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	24.217.027.664,89	(24.217.027.664,89)	(100,00)
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	16.282.804.716,33	(16.282.804.716,33)	(100,00)
8.1.07.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	16.282.804.716,33	(16.282.804.716,33)	(100,00)
8.1.07.01.01.0001	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	0,00	16.282.804.716,33	(16.282.804.716,33)	(100,00)
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	7.934.222.948,56	(7.934.222.948,56)	(100,00)
8.1.07.04.12	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	7.934.222.948,56	(7.934.222.948,56)	(100,00)
8.1.07.04.12.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	0,00	7.934.222.948,56	(7.934.222.948,56)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**104.370.581.205,74**	**140.284.756.824,88**	**(35.914.175.619,14)**	**(25,60)**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**0,00**	**5.588.364.431,54**	**(5.588.364.431,54)**	**(100,00)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	4.718.416.708,54	(4.718.416.708,54)	(100,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	4.718.416.708,54	(4.718.416.708,54)	(100,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	4.718.416.708,54	(4.718.416.708,54)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	834.773.008,00	(834.773.008,00)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	834.773.008,00	(834.773.008,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	834.773.008,00	(834.773.008,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	33.661.935,00	(33.661.935,00)	(100,00)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	33.661.935,00	(33.661.935,00)	(100,00)
8.1.08.03.02.0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	33.661.935,00	(33.661.935,00)	(100,00)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.512.780,00	(1.512.780,00)	(100,00)
8.1.08.04.02	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	1.512.780,00	(1.512.780,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.04.02.0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	1.512.780,00	(1.512.780,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**0,00**	**5.588.364.431,54**	**(5.588.364.431,54)**	**(100,00)**
	JUMLAH BEBAN	**104.370.581.205,74**	**145.873.121.256,42**	**(41.502.540.050,68)**	**(28,45)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**1.370.120.640.459,88**	**1.657.468.152.813,58**	**(287.347.512.353,70)**	**(17,34)**

Batam, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABDULLAH, S.Sos, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012101993031004

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Awal untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 105.048.576.247,29 Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.370.120.640.459,88 Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2025 Rp. 0,00 dan Akumulasi Amortisasi sd tahun 2025 sebesar Rp. 0,00, Lain-lain sebesar Rp.0,00 dan Ekuitas Akhir untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 108.713.573.287,30 Ekuitas tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024).

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	105.048.576.247,29	117.130.247.835,75
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	1.370.120.640.459,88	1.657.468.152.813,58
RK PPKD	(1.366.455.643.419,87)	(1.676.417.269.290,80)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	6.867.444.888,76
EKUITAS AKHIR	108.713.573.287,30	105.048.576.247,29

Batam, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABDULLAH, S.Sos, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012101993031004

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan peranan pelaporan keuangandan tujuan pelaporan keuangan, indikator pencapaian target kinerja, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan pos-pos neraca, laporan realisasi anggaran dan informasi non keuangan BadanPendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Penyajian Neraca yang menyangkut Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan transaksi dicatat pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pengakuan transaksi yang dicatat pada saat kas diterimaatau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam CaLK juga diungkapkan kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 295 ayat(1), (2), (3) dan (4) bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyajikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran yang berkenaan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD berupa Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD) Tahun 2024 yang terdiri:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD yang disajikan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;

4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1049);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan RiauTahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068).

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

A. Sumber Daya Manusia
B. Strategi dan Arah Kebijakan
C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
F. Kebijakan Akuntansi Belanja
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran;
B. Neraca;
C. Laporan Operasional;
D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB 2

BAB II
PROFIL SKPD

A. Sumber Daya SKPD

1. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai:

Tugas :

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan program kerja di lingkungan Pendapatan Daerah;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
c. membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat;
f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan;
g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;
h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan Pajak;
i. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Pengendalian dan Pengawasan;

j. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat di halaman berikut ini:

[Gambar 2.1]
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU (TIPE A)



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit pada Badan Pendapatan DaerahProvinsi Kepulauan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

   Kepala Badan Pendapatan Daerahmempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengembangan sumber daya manusia aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
   b. Pelaksana anggaran, perbendaharaan keuangan dan pendapatan, serta pelaporan keuangan dan aset;
   c. Pengelola ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
   d. Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
   e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja program, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, pengelolaanadministrasi dan pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi, serta pelaporan keuangan dan asset. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja
b. Melaksanakan pengolahan, analisis dan penyusunan bahan rencana strategis (Renstra)
c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Badan
d. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan
e. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan Badan
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan
g. Melaksanakan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja
h. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan
i. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja
j. Menghimpun data dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan, semester dan Tahunan
k. Melaksanakan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja
l. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan dan belanja Badan

m. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Badan

n. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Sub Bagian Program dan Keuangan

o. Melaksanakan pembinaan pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas

p. Melaksanakan koordinasi dengan uit terkait sesuai lingkup tugasnya

4. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan dinas
c. Melaksanaan urusan rumah tangga Badan
d. Mengkoordinasikan ketertiban dan keamanan kantor
e. Melaksanakan pemeliharaan dan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan
f. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan
g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Badan
h. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang
i. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang inventaris kantor

j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan barang inventaris
k. Melaksanakan pembukuan dan inventarisasi barang Badan
l. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang Badan
m. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data pegawai
n. Menyusun rencana kebutuhan kepegawaian meliputi penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP dan Penilaian Kinerja ASN, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, gaji berkala,kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian ASN, diklat, ujian dinas,izin belajar, pembinaan SDM dan disiplin pegawai, menyusun standarkompetensi ASN, tenaga teknis dan fungsional melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Badan
o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian
p. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian
q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkuptugasnya
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

5. Bidang Pengembangan Pendapatan

Mempunyai tugas pokokmelaksanakan pengembangan teknologi informasi pendapatan, pengembangan pelayanan dan pengolahan data dan hukum dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian pengembangan teknologi system informasi

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pengolahan data pendapatan
c. Pelaksanaan monitoring, Analisa dan pengolahan data pendapatan
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis di bidang hukum dan penyuluhan dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan

6. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah, mengumpul dan mengolah data dan informasi pendapatan Daerah, serta melaksanakan penyajian informasi pendapatan Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan sub bidang pengembangan sistem informasi
b. Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan teknologi sistem informasi pendapatan dan pelayanan publik
c. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik
d. Melaksanakan perawatan / pemeliharaan, dan pengembangan system informasi pendapatan daerah dan pelayanan publik
e. Mengelola perangkat keras teknologi yang mendukung operasional manajemen pelayanan publik dan tata kelola pendapatan
f. Melaksanakan pengelolaan sistem pencadangan database pendapatan
g. Melaksanakan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik
h. Mengelola sistem dan teknologi informasi, sistem komunikasi dan jaringan yang mendukung operasional sistem pelayanan publik dan tata kelola pendapatan

i. Menyiapkan konsep penataan database, program aplikasi, jaringan,perangkat komputer dan pendukungnya pada pengembangan system informasi pendapatan
j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
k. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan sub bidang pengembangan sistem informasi pendapatan
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

7. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Pengolahan Data

Mempunyai tugas pokok melakukan mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembanganpelayanan pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Sub BidangPengembangan Pelayanan dan Pengolahan Data
b. Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program pengembangan pelayanan dan pengolahan data
c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pendapatan daerah
d. Melakukan koordinasi pemutakiran data dan informasi pendapatan daerah
e. Menginventarisasi, mempelajari dan evaluasi data dan informasi dalam menyusun rencana target tahunan Pendapatan Daerah
f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pengembangan pendapatan daerah
g. Menyusun laporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
h. Menyusun buku data pendapatan secara periodic

i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan
j. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan pelaporan pendapatan
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
l. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

8. Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan kebijakan operasional. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan
b. Melaksanakan pengolahan, pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di bidang pendapatan daerah
c. Melaksanakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan produk hokum di bidang pendapatan daerah
d. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi produkhukum dalam bidang pendapatan daerah
e. Membantu penyelesaian keberatan pajak dan sengketa pajak
f. Memberikan pertimbangan hukum terhadap dokumen kerja sama dengan pihak ketiga
g. Melaksanakan pengkajian dan analisi hukum terkait penerimaan daerah
h. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada pegawai Badan terhadap permasalahan hukum pendapatan daerah
i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan
j. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan

k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

9. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Transfer Daerah, pengkajian bahan penyelesaian sengketa pajak daerah, dan penaatan pendapatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasiaan pendataan wajib pajak daerah
b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan administrasi dan pelayanan pajak, penyelesaian sengketa pajak daerah serta penaatan
c. Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis Verifikasi keberatan dan penaatan
e. Pengkoordinasiaan pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok;
f. Pengkoordinasiaan pemungutan dan pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
g. Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan bagi hasil pajak daerah
h. Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan dana transfer daerah
i. Pengkoordinasiaan pelaksanaan dan pelaporan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

10. Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis penerimaan pajak daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah;
b. Menghimpun dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara periodik
c. Mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif Pajak Daerah
d. Menyusun konsep produk hukum, petunjuk pelaksanaan dan teknis pengenaan Pajak Daerah serta pelaksanaan pemungutannya
e. Menyiapkan bahan penetapan target penerimaan Pajak Daerah
f. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah
g. Menggali potensi dan mengevaluasi sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
h. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
i. Melakukan kajian penyesuaian tarif Air Permukaan sesuai dengan perkembangan keadaan
j. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik KendaraanBermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP)
k. Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok
l. Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan,petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak Daerah
m. Menyiapkan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota
n. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi danklarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah kabupaten/kota secara periodik

o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Pajak Daerah
p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

11. Sub Bidang Penerimaan Retribusi, Lain-Lain PAD, dan Dana Transfer Daerah

Mempunyai tugas pokok bahan perumusan kebijakan teknis penerimaan Retribusi, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan subbidangpenerimaan Retribusi, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
b. Menghimpun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis,Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan TeknisRetribusi penerimaan Retribusi dan lain- lain PAD, dan Dana Transfer Daerah dengan instansi terkait
c. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil
d. Melakukan pendataan, inventarisasi subjek dan wajib Retribusi Daerah bersama dengan instansi teknis terkait
e. Melakukan pengkajian sumber – sumber Retribusi Daerah danpenyesuaian subjek dan tarif Retribusi Daerah bersama- sama instansi teknis terkait sesuai dengan perkembangan keadaan
f. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan PemerintahPusat terkait dengan pengelolaan Dana Transfer Daerah
g. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan SKPD daninstansi terkait dalam penyusunan Data Dasar penghitungan DanaAlokasi umum (DAU)

h. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan SKPD daninstansi terkait dalam penyusunan Data Dasar penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)
i. Menyiapkan Data Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah, pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Transfer Daerah
j. Menyiapkan bahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(CHT) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
k. Menyusun program kegiatan terkait dengan alokasi DBH CHT dengan instansi teknis terkait
l. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil CHT, dan menyusun laporan penyaluran Dana Bagi Hasil CHT dengan Kabupaten/Kota
m. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Retribusi dan lain- lain PAD dengan SKPD Teknis
n. Menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan Tarif Retribusi Daerah, lain-lain PAD dan Dana Transfer Daerah dan Pendapatan Lainnya untuk penyusunan RAPBD sesuai dengan kondisi objektif daerah
o. Menyusun dan menyiapkan pedoman pelaksanaan pungutan lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
p. Mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
q. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Dana Transfer Daerah bersama instansi terkait
r. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring danklarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah, lain-lain PAD, dan Dana Transfer Daerah
s. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan retribusi, lain-lain PAD dan Dana Transfer Daerah
t. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Subbidang Retribusi,lain-lain PAD dan Dana Transfer Daerah

u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

12. Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penataan Pendapatan

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan verifikasi pertimbangan keberatan dan penyelesaian sengketa pajak, serta penaatan dalam rangka penegakan hukum dibidang pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Sub bidang Verifikasi Keberatan dan Penaatan Pendapatan
b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan verifikasi dan pertimbangan keberatan pajak daerah dan penyelesaian sengketa pajak
c. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penaatan pendapatan
d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan atas pengajuan surat permohonan keberatan pajak Daerah sertapemberian pertimbangan atas permohonan keberatan pajak Daerah
e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penatausahaan berkas - berkas permohonan keberatan pajak Daerah
f. Mempertimbangkan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah
g. Melaksanakan penyusunan bahan pedomaan penatausahaan penghapusan pajak Daerah
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan pajak
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa pajak
j. Melaksanakan verifikasi dan pemberian pertimbangan keberatan pajak daerah

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang koordinasi penyelesaian sengketa pajak
l. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang koordinasi penaatan pajak
m. Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyelesaian kasus pajak daerah dan tindak pidana pajak daerah
n. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan serta penyidikan terhadap pelanggaran kasus pajak daerah dan tindak pidana pajak daerah
o. Melaksanakan instrumen hukum pajak dan penindakan
p. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Penaatan Pendapatan
q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

13. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Mempunyai tugas pokok Penyiapan bahan perumusan Kebijakan teknis pengendalian administrasi dan operasional, pengendalian penerimaan pendapatan daerah, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan bidang pengendalian administrasi dan operasional
b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, Koordinasi, pembinaan teknis pengendalian penerimaan pendapatan daerah
c. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis pembukuan dan pelaporan

d. Melakukan pengendalian Intern terhadap pemungutan meliputi teknis administrasi dan keuangan
e. Melaksanakan koordinasi dengan pengawas intern dan ekstern
f. Menyusun laporan hasil pengendalian intern dan evaluasi
g. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian intern
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan pembinaan dan
i. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

14. **Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional**

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengendalian teknis administrasi dan operasional. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkanbahanperencanaan program kegiatan subbidang pengawasan teknis administrasi dan operasional
b. Melaksanakan rencana stategis dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang pengendalian teknis administrasi dan operasional sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Melakukan pengendalian, analisa dan evaluasi terhadap Administrasi dan opersional kegiatan pelayanan pendapatan daerah
d. Merumuskan masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan oleh Kapala Badan terkait dengan adm dan operasional kegiatan pendapatan daerah
e. Melakukan pengendalian, evaluasi dan analisis terhadap administrasi dan operasional kegiatan pendapatan daerah
f. Mengawasi pelaksanaan pengendalian administrasi dan Operasional
g. Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa ekstrenal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah

h. Melakukan monitoring dan evalausi pelaksanaan kapatuhan internal dan melakukan bimbingan dan konsultasi atas pengaduan terkait pendapatan daerah
i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan internal serta penanganan pengaduan
j. Melakukan monitoring dan evaluasi manajemen sumber daya manusia pendapatan daerah
k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya
l. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Subbidang Pengendalian Administrasi dan Operasional
m. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan teknis administrasi dan operasional dan
n. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

15. **Sub Bidang Pengendalian Pendapatan dan Pengawasan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan Subbidang Pengendalian Pendapatan daerah
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standarteknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah
c. Melaksanakan kegiatan pengendalian teknis pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Melaksanakan pengawasan perencanaan penerimaan daerah meliputireview atas sumber-sumber data dan informasi pendapatan daerah dan review atas adminsitrasi pendapatan
e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan meliputi review atas penarikan, penagihan, pengumpulan pendapatan daerah

f. Melaksanakan pengawasan hasil penerimaan pendapatan daerah meliputi pemeriksaan atas seluruh penerimaan daerah yang telah disetor ke rekening kas daerah secara berkala atau insidentil
g. Melaksanakan pengendalian, analisa, evaluasi dan estimasi pencapaian realiasasi penerimaan pendapatan daerah serta upaya dan strategi pencapaian penerimaan
h. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis pemungutan teknis pendapatan daerah kepada pegawai Badan Pendapatan
i. Menyiapkan bahan rumusan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah
j. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP
l. Melaksanakan pengendalian perencanaan pendapatan daerah
m. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengendalian Pendapatan
n. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah
o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
p. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

16. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknisPembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah

c. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembuatanrekapitulasi penetapan dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
d. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
e. Melakukan rekonsialiasi data realisasi penerimaan pendapatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait secara periodik
f. Melakukan rekonsialiasi data piutang pendapatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait secara periodik
g. Membantu menyiapkan data realiasasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan Badan
h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah
j. Menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di sub bidang pengendalian pendapatan
k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai lingkup tugasnya dan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat dengan rincian tugas:

a. Menyusun Bahan Perencanaan Operasional Di Lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
b. Mendistribusikan tugas kepada bahawahan di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
d. Menyusun bahan tugas – tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPT;
e. Menyusun Bahan Tugas – Tugas Dan Kebijakan Teknis Terkait Pengelolaan Pajak Daerah;
f. Menyusun bahan tugas – tugas dan kebijakan teknis terkait pengelolaan retribusi daerah dan pungutan pendapatan lainnya;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan teknis UPT;
h. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Bawahan Di Lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;
i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Upt Pengelolaan Pendapatan Daerah;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Adapun Unit Pelayanan Badan Pendapatan DaerahProvinsi Kepulauan Riau terdiri dari 10 (sepuluh) UPT PPD dengan klasifikasi sebagai berikut :

- UPT kelas A
  1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre
  2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang
  3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan
  4. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun
  5. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingga
  6. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Natuna
  7. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepulauan Anambas

- UPT kelas B
  1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batu Aji
  2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang

3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Batu

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD Kelas A Dan B) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :

[Gambar 2.2]

Struktur organisasi UPT PPD Tipe A

Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

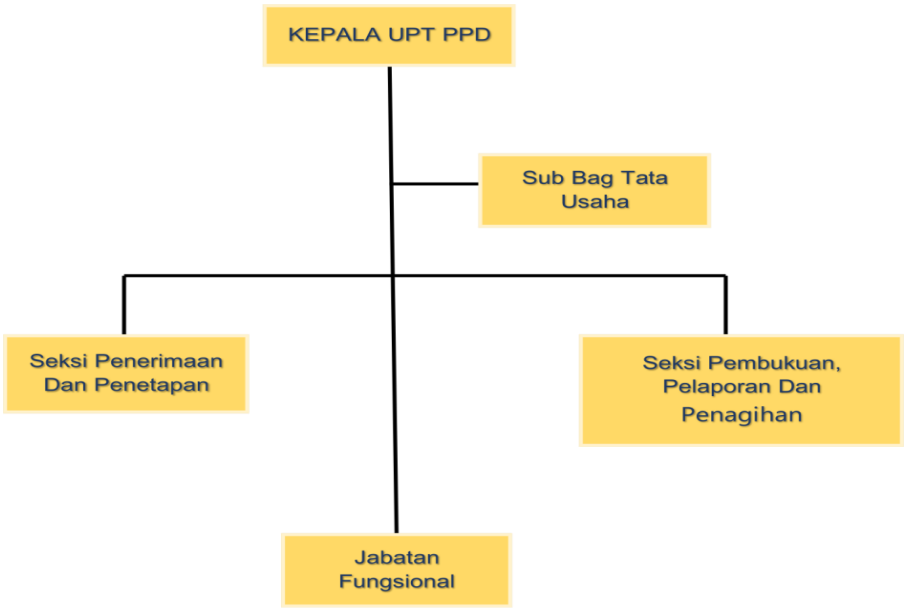

[Gambar 2.3]

Struktur organisasi UPT PPD Tipe B

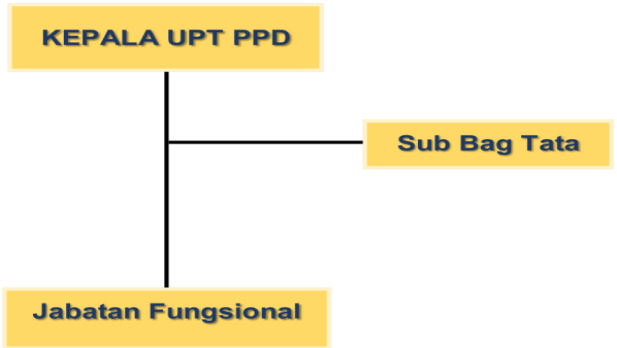

2. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 435 orang pegawai (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu) dengan jenjang pendidikan S2, SI, D3, dan SMA. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara terperinci, jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel [2.1]

Pegawai BAPENDA Menurut Jabatan Eselon
Secara terperinci, jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Jabatan/Eselon	Jumlah Pegawai	
1.	Kepala Badan	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang dan Kepala. UPT PPD	13	Orang
4.	Kepala Sub- Bagian/ Kepala Seksi	33	Orang

5.	Pejabat Fungsional	22	Orang
6.	Staf Pelaksana	113	Orang
7.	Staf PPPK	247	Orang
8.	Staf PPPK Paruh Waktu	5	Orang
Jumlah		**435**	**Orang**

Tabel [2 .2]
Pegawai **BAPENDA** Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	
1.	Doktor (S3)	2	Orang
2.	Pasca Sarjana (S2)	51	Orang
3.	Sarjana (S1)	203	Orang
4.	Ahli Madya (D4)	42	Orang
5.	Ahli Madya (D3)	20	Orang
6.	Ahli Madya (D1)	2	Orang
7.	SMA	146	Orang
8.	SMP	4	Orang
9.	SD	5	Orang
Jumlah		435	Orang

Sedangkan jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau menurut strukutur organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel [2 .3]
Pegawai BAPENDA Menurut Struktur Organisasi

No	Struktur Organisasi	PNS	PPPK	PPPKPW	Jumlah	Ket
1.	Sekretariat	25	32	11	58	PUSAT
2.	Bidang Pendapatan	12	7	-	19	PUSAT
3.	Bidang Pengembangan	9	5	-	14	PUSAT
4.	Bidang Penagihan	11	6	-	17	PUSAT
5.	Bidang Pengawasan	8	5	-	13	PUSAT
6.	UPT PPD Batam Centre	25	43	-	68	TIPE A
7.	UPT PPD Tanjung Pinang	25	44	1	70	TIPE A
8.	UPT PPD Bintan	9	12	-	21	TIPE A

9	UPT PPD Karimun	14	24	-	38	TIPE A
10	UPT PPD Lingga	6	12	1	19	TIPE A
11	UPT PPD Natuna	8	12	-	20	TIPE A
12	UPT PPD Kep. Anambas	7	5	-	12	TIPE A
13	UPT PPD Batuaji	12	18	-	30	TIPE B
14	UPT PPD Kijang	7	13	-	20	TIPE B
15	UPT PPD Tanjung Batu	5	9	2	16	TIPE B
	JUMLAH	**183**	**247**	**5**	**435**	

3. Sumber Daya Aset

Dalam Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 jumlah Aset tercatat sebesar Rp.106.774.965.676,80, yang terdiri dari aset lancar senilai Rp. 53.388.772.018,59, aset tetap yang senilai Rp. 53.450.995.009,21 dan aset lainnya sebear Rp.64.801.351,00. Aset tetap tersebut terdiri atas golongan Tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi serta aset tetap lainnya. Aset tetap dari golongan peralatan dan mesin diantaranya adalah kendaraan operasional sedangkan aset golongan gedung dan bangunan merupakan gedung/kantor yang jumlah dan status kepemilikan nya tergambar sebagai berikut :

a. Tanah dan gedung bangunan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berada pada kantor Bapenda Kepri dan UPT PPD Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

Tabel [2.4]
Aset Berdasarkan Status Kepemilikan

No.	Uraian	Keterangan/Status
1	Kantor Graha Kepri	Aset Pemprov Kepri
2	UPT PPD Batam Centre	Aset Pemprov Kepri
3	UPT PPD Tanjungpinang	Aset Pemprov Kepri
4	UPT PPD Bintan	Aset Pemprov Kepri
5	UPT PPD Karimun	Aset Pemprov Kepri
6	UPT PPD Lingga	Aset Pemprov Kepri & Sewa (di Daik)
7	UPT PPD Natuna	Sewa
8	UPT PPD Anambas	Pinjam Pakai Aset Pemkab Anambas
9	UPT PPD Batu Aji	Sewa
10	UPT PPD Kijang	Sewa
11	UPT PPD Tanjung Batu	Aset Pemprov Kepri

Masih terdapat 4 (empat) gedung/kantor pelayanan yang belum merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu: UPT PPD Natuna (sewa), UPTD PPD Anambas (pinjam pakai aset PemKab Anambas), UPT Batu Aji (sewa) dan UPT PPD Kijang (sewa).

b. Aset kendaraan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari:

Tabel [2.5]

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Berdasarkan Kondisi

			Kondisi	

No	Nama / jenis Aset	Satuan	Baik	Rusak	Jumlah
1	Kendaraan operasional Roda 4	unit	33	-	33
2	Kendaraan operasional Bus dan Minibus	unit	7	-	7
3	Kendaraan operasional Roda 2	unit	57	4	61
4	Kendaraan operasional Laut (Speedboat)	unit	1	-	1

B. Strategi dan arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program perencanaan pembangunan sebagai prioritas pembangunan Daerah dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani prioritas Nasional. Dengan demikian, strategi harus disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Secara umum strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ektensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebiajkan pembangunan atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

Tabel [2.6] Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

Visi RPJMD : *Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya*				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1.	Peningkatan PAD	1. Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya	1. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan	1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah 2. Melakukan analisa Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 3. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Retribusi Daerah 4. Pendataan Wajib Pungut Retribusi Daerah 5. Bersama OPD terkait memetakan dan mendayagunakan asset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD

Visi RPJMD : *Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya*				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pungut Retribusi Daerah	1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan 2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan
			3. Mengupayakan Peningkatan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	1. Mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD 2. Mendorong perluasan usaha dan pemanfaatan peluang kerjasama BUMD dengan pihak swasta lainnya 3. Mendorong penataan manajemen BLUD dalam upaya peningkatan layanan
		2. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah	4. Mengoptimalkan penerimaan Pajak daerah dengan melakukan penguatan pada data base pajak daerah	1 Melakukan analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2 Meningkatkan kualitas data base objek pajak kendaraan bermotor dan lainnya

Visi RPJMD : *Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya*				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				3 Melakukan perhitungan penyesuaian besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang komprehensif 4 Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Pajak Daerah
			5. Mengoptimalkan penagihan untuk menurunkan tingkat piutang Pajak Daerah	1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak 2. Melakukan penagihan aktif dengan melibatkan partisipasi perangkat 3. Melakukan penagihan dengan upaya paksa bersama dengan instansi terkait.

Visi RPJMD : *Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya*				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.	5. Penyediaan sarana prasarana layanan Samsat yang modern serta penyederhanaan administrasi pelayanan Samsat	1. Menyediakan Sarana Prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang Responsif Gender dan Ramah Difable 2. Penyempurnaan system komputerisasi pada unit-unit pelaksana teknis pemungutan 3. Melakukan Standarisasi Prosedur Pelayanan melalui ISO 4. Menyempurnakan SOP Pelayanan Pajak Daerah
			6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur	1. Melaksanakan atau mengikutsertakan aparatur pada Bimtek/Diklatsan 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional maupun aparatur pemungutan Pajak Daerah

Visi RPJMD : *Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya*				
Misi ke 1 : Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.				
Tujuan RPJMD : Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran RPJMD : Peningkatan PAD				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			7. Mengembangkan layanan pembayaran Pajak berbasis IT	1. Melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pembayaran Pajak 2. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak pihak terkait untuk pembayaran pajak secara elektronik
			8. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	

C. Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA ANGGARAN SKPD

1. INDIKATOR TARGET KINERJA SKPD

   Indikator Pencapaian kinerja Anggaran SKPD merupakan alat untuk mengukur kinerja SKPD dengan berpedoman kepada orientasi hasil yang akan diperoleh atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja SKPD (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKT) merupakan tahapan tahapan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis SKPD. Pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka perwujudan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKT).

2. INDIKATOR TARGET PENDAPATAN SKPD

   Indikator target kinerja pendapatan SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel [2.7]

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Pendapatan	Target Kinerja (Rp.)	Realisasi Target Kinerja (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (Rp.)	%
4.1.01	**Pajak Daerah**	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**(169.953.566.157,50)**	89,49
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	(38.802.097.003,00)	91,26
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	(126.091.674.418,00)	68,44
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	11.297.787.553,00	102,36
4.1.01.04	Pajak air Permukaan	33.933.643..819,00	33.017.182.076,00	(916.461.743,00)	97,30
4.1.01.05	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	(6.362.816.620,00)	96,48
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	(3.720.615.948,00)	14,17
4.1.01.18	Opsen Pajak MBLB	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	(5.357.687.978,50)	92,97
4.1.02	Retribusi Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	(3.882.830.705,09)	86,94
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	(29.398.500,00)	97,78

Tabel Perbandingan [2.8]

Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
PENDAPATAN	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**	**1.793.639.631.181,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**	**1.792.346.931.181,00**
Pendapatan Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,00	89,49	1.777.704.385.140,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.771.041,00
BELANJA	**110.833.568.573,00**	**106.780.871.893,20**	**96,34**	**115.930.186.890,20**
BELANJA OPERASI	**108.701.582.312,00**	**105.347.195.774,75**	**96,91**	**112.209.144.780,20**
Belanja Pegawai	70.897.568.462,47	70.191.130.509,00	99,00	75.978.849.916,00
Belanja Barang/Jasa	37.804.013.849,53	35.156.065.265,75	93,00	36.230.294.864,20
BELANJA MODAL	**2.131.986.261,00**	**1.433.676.119,00**	**67,25**	**3.721.042.110,00**
Belanja Peralatan dan Mesin	2.096.233.261,00	1.401.871.119,00	66,88	3.596.242.110,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**1.537.523.448.455,21**	**1.367.710.349.771,87**	**88,96**	**1.667.709.444.290,80**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**1.537.523.448.455,21**	**1.367.710.349.771,87**	**88,96**	**1.667.709.444.290,80**

Tabel [2.9]

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau ahun 2025

No	JENIS PENDAPATAN	TARGET PENERIMAAN 2025 (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN 2025 (Rp.)	CAPAIAN (%)
	A. PENDAPATAN	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**
	a. PAJAK DAERAH	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,00**	**89,49**
	1). PKB	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26
	2). BBN-KB	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44
	3). PBB-KB	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36
	4). Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30
	5). Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48
	6). Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17
	7). Pajak MBLB	76.184..352.876,00	70.826.664.897,50	92,97
	b. LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**86,94**
	1). Pendapatan Denda PKB	13.955.066.122,21	9.948.896.000,00	71,29
	2). Pendapatan Denda BBN-KB	2.787.600,00	2.837.900,00	101,87
	3). Pendapatan Denda PBB-KB	0,00	91.312.431,00	0,00
	4). Pendapatan Denda PAP	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00
	5). Pendapatan Denda Opses Pajak MBLB	0,00	32.671.118,12	0,00
	c. Retribusi Daerah	**52.980.000,00**	**52.980.000,00**	**100,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00
	d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	**97,78**
	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78
JUMLAH		**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**

4.1. INDIKATOR TARGET BELANJA SKPD

Alokasi belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari anggaran belanja operasi dan anggaran belanja modal. Anggaran belanja operasi terdiri dari belanja pegawai gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNS dan belanja barang/jasa berupa barang pakai habis dan jasa kantor. Sedangkan alokasi belanja modal dalam bentuk anggaran belanja peralatan dan mesin, Gedung bangunan dan aset tetap lainnya. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD. Program dan kegiatan yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari **Program 3, Kegiatan 13 dan Sub Kegiatan 48.**

Indikator target kinerja belanja SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**.** Target Kinerja masing - masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

TABEL [2.10]

TARGET KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	100,192,336,260.94
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	94,444,651,086.88
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240,861,530.93
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159,867,266.50
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,171,500.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,822,764.43
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,824,374,617.51
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73,211,805,017.51
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,601,088,000.00
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,481,600.00
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94,100,565.49
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94,100,565.49
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	326,821,982.88
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	123,924,582.88
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	113,032,600.00
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	53,157,400.00
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36,707,400.00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97,500,000.00
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97,500,000.00
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,006,282,149.46
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000.00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471,386,200.00
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	413,234,896.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	602,419,400.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,228,712,300.00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49,980,000.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000,000.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938,583,088.54
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	121,966,264.92
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,337,890,050.00
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	464,860,000.00
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,873,030,050.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,057,838,089.91
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,290,000.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,770,733,478.00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210,000,000.00
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,057,814,611.91
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,458,982,100.70
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	943,575,016.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262,698,668.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,252,708,416.70
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**376,904,800.00**
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	164,903,000.00
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	164,903,000.00
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	151,798,400.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	151,798,400.00
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	60,203,400.00
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60,203,400.00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5,370,780,374.06**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,370,780,374.06
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	258,462,894.00
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	244,767,000.00
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,725,768,600.00
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	908,373,353.89
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,469,527,413.54
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	12,600,000.00
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	95,803,400.00
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40,893,000.00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	284,998,870.54
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	116,642,032.15
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	67,550,309.94
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94,704,700.00
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50,688,800.00
		100,192,336,260.94

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0001	**UPT PPD BATAM CENTRE**	**3,232,910,743.27**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2,133,298,369.48**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995,398,004.48
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,531,400.00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194,937,300.00
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,200,000.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243,040,800.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	405,608,783.00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105,079,721.48
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,426,400.00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,661,400.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,765,000.00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,000,000.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938,473,965.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	878,423,965.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,050,000.00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1,099,612,373.79**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,099,612,373.79
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	185,880,000.00
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	25,563,500.00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450,293,564.72
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	437,875,309.07
	JUMLAH	**3,232,910,743.27**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0002	**UPT PPD TANJUNGPINANG**	**1,951,590,732.17**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1,105,153,311**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,762,440
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,762,440
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424,836,435
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,038,470

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,262,116
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138,009,711
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,363,798
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,990,000
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,831,500
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,340,840
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273,596,746
5.02.01.1.08.0001	Penyedia Jasa Surat Menyurat	3,892,400
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267,199,346
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,505,000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381,957,690
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205,030,500
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58,540,000
5.02.01.1.09.0010	pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	118,387,190
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**846,437,421**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	846,437,421
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	210,657,735
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	38,671,000

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	504,370,927
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92,737,759
	JUMLAH	**1,951,590,732.17**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0003	**UPT PPD BINTAN**	**1,062,746,989.23**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**741,162,834.57**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,550,000.00
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,550,000.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195,129,492.35
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,256,500.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,081,600.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52,115,800.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,675,592.35
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133,726,144.00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,500,000.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124,226,144.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358,757,198.22
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan kendaran Dinas	216,117,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	30,050,000.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	112,590,198.22
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**321,584,154.66**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	321,584,154.66
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	110,178,169.77

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	18,996,000.00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	47,897,984.89
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	144,512,000.00
	JUMLAH	**1,062,746,989.23**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0004	**UPT PPD KARIMUN**	**997,838,243.25**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**680,585,504.95**
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,676,235.03
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,116,748.00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,593,229.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,573,880.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,190,000.00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,684,500.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158,517,878.03
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,129,900.00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,676,100.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281,453,800.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,779,369.92
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,165,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,600,500.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62,013,869.92

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**317,252,738.30**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	317,252,738.30
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	105,503,151.60
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3,750,000.00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141,609,386.70
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	66,390,200.00
	JUMLAH	**997,838,243.25**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0005	**UPT PPD LINGGA**	**511,736,913.83**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**256,786,361.00**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102,316,271.00
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,014,025.00
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,998,630.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,127,616.00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,980,000.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,196,000.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,072,000.00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,480,000.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,592,000.00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan jasa Peralatan kantor	-
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,398,090.00
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,200,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6,344,170.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	31,853,920.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	254,950,552.83
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	254,950,552.83
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	49,086,573.27
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58,087,426.70
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	73,222,552.86
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	74,554,000.00
	JUMLAH	**511,736,913.83**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0006	**UPT PPD NATUNA**	**633,537,771.03**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**462,097,866.06**
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251,557,658.25
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,120,900.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,723,000.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,713,758.25
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,173,600.00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,673,600.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,366,607.81
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan kendaran Dinas	77,410,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6,100,000.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	31,856,607.81
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**171,439,904.97**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	171,439,904.97
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25,800,000.00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	96,639,904.97
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49,000,000.00
	JUMLAH	**633,537,771.03**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0007	**UPT PPD ANAMBAS**	**415,953,985.15**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**203,632,047.00**
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129,981,347.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,635,587.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22,190,760.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61,155,000.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,610,700.00
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,150,000.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,460,700.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,040,000.00
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,710,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	3,330,000.00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**212,321,938.15**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	212,321,938.15
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	134,408,477.44
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77,913,460.71
	JUMLAH	**415,953,985.15**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0008	**UPT PPD BATU AJI**	**896,905,519.09**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**643,074,884.71**
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**321,487,075.98**
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,781,400.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,817,700.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194,207,200.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65,063,600.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,617,175.98
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**167,139,680.00**
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,081,200.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,058,480.00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,000,000.00
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154,448,128.73**
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,800,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,460,000.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79,188,128.73
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**253,830,634.38**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**253,830,634.38**
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	111,875,754.48
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141,954,879.90
	JUMLAH	**896,905,519.09**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0009	**UPT PPD KIJANG**	**555,180,161.29**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**400,403,433.65**
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162,346,100.00**
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,836,800.00
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,283,900.00

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,177,200.00
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56,438,200.00
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,184,400.00
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,445,600.00
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,980,000.00
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101,797,000.00**
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,480,000.00
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,215,000.00
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,102,000.00
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136,260,333.65**
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96,260,000.00
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,880,000.00
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	32,120,333.65
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**154,776,727.64**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**154,776,727.64**
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40,804,625.00
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2,778,000.00
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	46,180,302.64
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65,013,800.00
	JUMLAH	**555,180,161.29**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).
1	2	3
5.02.0.00.0.00.26.0010	**UPT PPD TANJUNG BATU**	**382,831,253.75**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**276,750,079**
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**107,870,150**
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,565,000
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,984,500
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37,728,650
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,592,000
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52,368,900**
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,368,900
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116,511,029**
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,060,000
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,720,000
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	63,731,029
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**106,081,175**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**106,081,175**
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16,311,000
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	89,770,175
	JUMLAH	**382,831,254**

BAB
3

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 tercermin melalui capaian kinerja rencana kerja tahunan dibandingkan dengan rencana anggaran dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rencana kerja SKPD dan solusi yang ditempuh sehingga tujuannya diharapkan dapat tercapai. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah merupakan tahapan realiasi atau pelaksanaan rencana kerja SKPD yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pada akhirnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai.

3.1. PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 masih dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industry otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pemberlakuan Undang Undang HKPD dan skema opsen pajak mempengaruhi realisasi pencapaian target penerimaan pendapatan pajak daerah, dan melalui kebijakan pemberian insentif pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan realisasi pendapatan daerah dapat bertumbuh secara positif. Pencapaian secara keseluruhan pada target pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 89,45 persen. Pencapaian target pendapatan Badan Pendapatan Daerah menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

Gambar [3.1]

Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah



Tabel [3.1]

Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

URAIAN	TARGET ANGGARAN 2025	TARGET ANGGARAN PERUBAHAN 2025	REALISASI	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
PENDAPATAN DAERAH	**1.612.365.938.806,00**	**1.648,357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,49**
PAJAK ASLI DAERAH (PAD)	**1.583.783.730.316**	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**
A. PAJAK DAERAH	**1.583.783.730.316,00**	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	**89,49**
1. PKB	410.654.885.594,00	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	**91,26**
2. BBN-KB	399.572.412.018,00	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	**68,44**
3. PBB-KB	478.452.376.124,00	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	**102,36**
4. Pajak Air Permukaan	33.933.643.819,00	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	**97,30**
5. Pajak Rokok	180.651.107.585,00	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	**96,48**

6. Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17
7. Pajak Opsen MBLB	76.184.352.876,00	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	**92,97**
B. RETIRIBUSI DAERAH	**200.000.000,00**	**52.980.000,00**	**52.980.000,00**	**100,00**
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah)	200.000.000,00	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00
C. LAIN_LAIN PAD YANG SAH	**28.382.208.490,21**	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**86,94**
6. Pendapatan Denda PKB	12.598.752.000,21	13.955.066.122,21	9.948.896.000,00	71,29
7. Pendapatan Denda BBN-KB	2.787.600,00	2.787.600,00	2.837.900,00	101,80
8. Pendapatan Denda PBB-KB	0,00	0,00	91.312.431,00	0,00
9. Pendapatan Denda PAP	15.783.456.490,00	15.783.456.490,00	15.782.762.058,00	100,00
10. Pendapatan Denda MBLB	0,00	0,00	32.671.118,00	0,00
D. LAIN_LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**1.324.102.500,00**	**1.324.102.500,00**	**1.294.704.000,00**	**97,78**
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	1.324.102.500,00	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 memberikan kontribusi sebesar 89,45 persen lebih rendah dibandingkan pada tahun anggaran 2024 sebesar 100,57 persen.
b. Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yg Sah memberikan kontribusi sebesar 86,94 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun anggaran 2024 sebesar 33,36 persen.
c. Pencapaian realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2025 memberikan kontribusi sebesar 86,94 persen lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun anggaran 2024 sebesar 102,37 persen.

Gambar [3.2]

Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan 2024

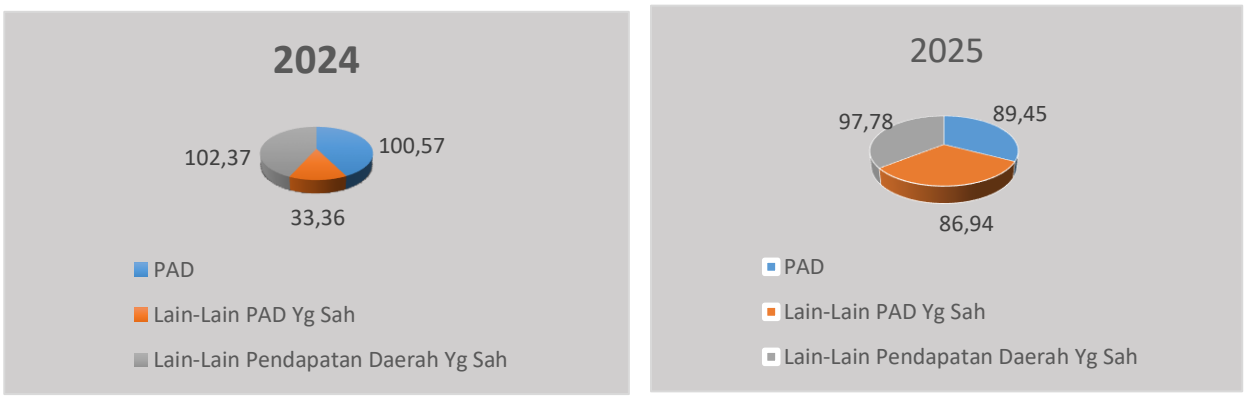

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 ditargetkan sejumlah Rp.1.648.357.017.028.21 Dengan realisasi Rp.1.474.491.221.665,62 atau 89,45 persen, mengalami penurunan sebesar 17,79 persen atau pengurangan sejumlah (Rp.319.148.409.515,38) dibandingkan tahun anggaran 2024.

Capaian pendapatan daerag dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pajak daerah ditargetkan sejumlah Rp.1.617.238.624.316,00 terealisasi sejumlah Rp.1.447285.058.158,00 atau 89,49 persen, mengalami penurunan sejumlah Rp.330.419.326.982,00 atau 18,58 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.
b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.52.980.000 terealisasi Rp.52.980.000,00 mengalami penurunan sejumlah Rp.18.795.000,00 (9,39 persen), apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, walaupun terealisasi 100 persen pada tahun 2025.
c. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sejumlah Rp.29.741.310.212,21 dapat terealisasi Rp.25.8558.479.507,12 atau 86,94 persen, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2024 persentase pencapaian mengalami kenaikan sejumlah Rp.11.287.708.466,12 atau 43,65 persen.

Gambar [3.3]

Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

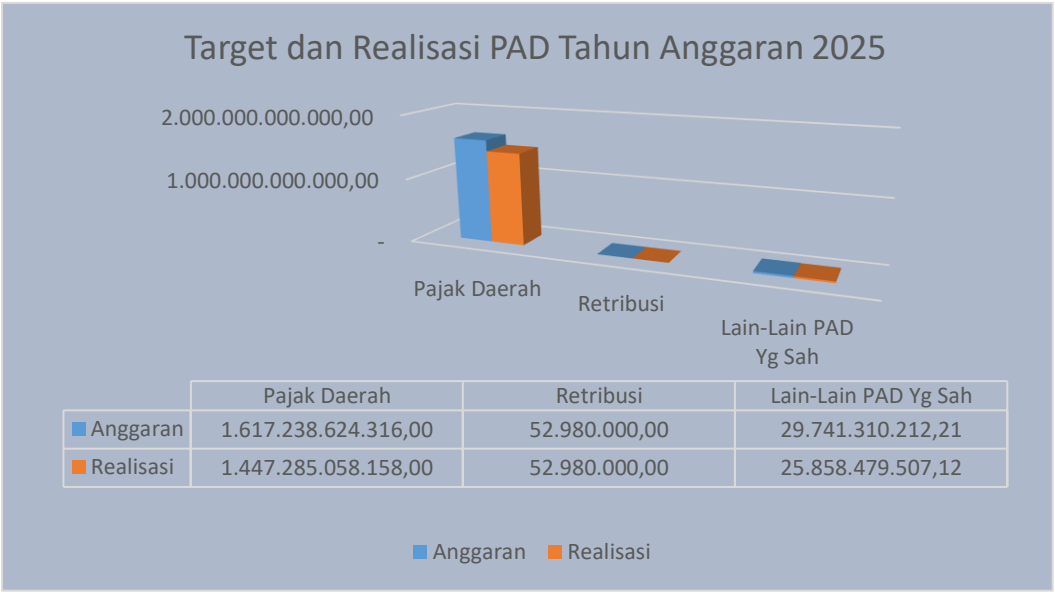

	Pajak Daerah	Retribusi	Lain-Lain PAD Yg Sah
Anggaran	1.617.238.624.316,00	52.980.000,00	29.741.310.212,21
Realisasi	1.447.285.058.158,00	52.980.000,00	25.858.479.507,12

- Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya (2024). Beberapa komponen yang belum mencapai target seperti Pajak Kendaraan Bermotor (91,26%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (68,44%), Pajak Air Permukaan (97,30%), Pajak Rokok (96,48%), Pajak Alat Berat (14,17%) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (92,97%).

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipengaruhi oleh dampak implementasi undang-undang HKPD dan opsen pajak serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta berkurangnya penjualan kendaraan bermotor yg disebabkan oleh factor ekonomi makro dan daya beli masyarakat yang menurun, keterbatasan data alat ukur dan kepatuhan WP juga menjadi penyebab ketidaktercapaian pajak air permukaan. Pada Realisasi Pajak alat berat dan Opsen pajak MBLB selain dipengaruhi oleh dampak kebijakan UU HKPD bahwa pajak baru memerlukan masa penyesuaian/sosialisasi, dan perlunya sinkronisasi data base alat berat bersama OPD teknis (Disnaker, ESDM, PTSP).

Gambar [3.4]

Matrik Evaluasi Sektor Pajak Daerah

MATRIK EVALUASI KETIDAKTERCAPAIAN
SEKTOR PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK	CAPAIAN	SURPLUS/DEFISIT	FAKTOR UTAMA
1	2	3	6 = 4-3	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	91,26%	(38.802.097.003)	Kebijakan UU Nomor 1 Th 2022 dan SE Mendagri (Opsen dan Insenstif Fiskal)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	68,44%	(126.091.674.418)	Insentif dan Daya Beli
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	102,36%	11.297.787.553	
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	97,30%	(916.461.743)	Tarif dan Alat Ukur Meteran Belum tersedia
5	Pajak Alat Berat (PAB)	14,17%	(3.720.615.948)	Sektor Pajak Baru, Pendataan, Regulasi NJAB serta Sosialisasi
6	Pajak Rokok	96,48%	(6.362.816.620)	Kebijaka Pusat (Given)
7	Opsen Pajak MBLB	92,97%	(5.357.687.979)	Stop Produksi Perusahaan Kuarsa dan Perbedaan Persepsi Pemungutan Pajak MBLB
JUMLAH TOTAL		**89,49%**	**(169.953.566.158)**	

Gambar [3.5]

Perbandingan Realisasi PKB dan BBNKB
Tahun 2025 dan 2024

PERBANDINGAN REALISASI PKB & BBNKB TH. 2025 & 2024
(UU HKPD NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009)

JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN 2025 UU HPKD NO. 1 TAHUN 2025				TAHUN 2024 UU NO. 28 TAHUN 2009		
	BAGIAN PROVINSI	BAGIAN KABUPATEN/KOTA		TOTAL CAPAIAN PKB & BBNKB TERMASUKI OPSEN	HAK PROVINSI 70%	HAK KAB/KOTA 30%	TOTAL CAPAIAN PKB & BBNKB
		DBH	OPSEN				
PKB Target : Rp. 444.109.779.594	306.453.924.595	98.853.757.996	202.274.266.400	607.581.949.081	417.257.318.757	178.824.545.181	596.081.883.978
		301.128.024.486					
% CAPAIAN NAIK/TURUN	(110.803.294.162) -26.55%	122.303.459.305 +68.39%		11.500.065.43 1.93%			
BBNKB Target : Rp. 399.572.412.018	226.205.742.600	47.274.995.000	149.295.740.000	422.776.477.600	365.901.646.950	156.814.991.550	522.716.676.500
		196.570.735.000					
% CAPAIAN	-139.695.904.350 -38,16%	+163.940.741.050 104.54%		-99.940.198.900 (-19,12%)			

- Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja Bapenda Kepri salah satunya adalah keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak belum optimal (dilihat dari jumlah piutang pajak daerah yang semakin meningkat, angka tunggakan pajak dibawah 2024 masih rata-rata diatas 64%)
- Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan beberapa upaya antara lain:
  - Membangun dan meningkatkan sinergi atau Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah Kabupaten/Kota, civitas akademik, perusahaan dan pihak lainnya dalam melakukan sosialisasi, pendataan, pelayanan pemungutan serta penagihan pajak daerah seiring dengan diberlakukannya ketentuan Opsen Pajak pada Tahun 2025;
  - Membangun dan mengembangkan system pajak digital dan pelayanan pajak melalui inovasi Samsat;
  - Melakukan sosialisasi kepatuhan membayar pajak berkerjasama dengan Tim Pembina Samsat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan publikasi melalui platform media, baik media cetak, online maupun media sosial.

3.2. PENCAPAIAN KINERJA BELANJA SKPD

Belanja Daerah merupakan segala penggunaan sumber dana (use of fund) untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengkasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategorial yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pencapaian kinerja belanja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, yang tertuang dalam program dan kegiatan. Belanja pegawai adalah berupa realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan bagi PNS.

Sedangkan realisasi belanja barang/jasa berupa belanja operasional rutinitas perkantoran yang mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah dan belanja modal berupa sarana prasarana yang menambah nilai aset. Realisasi belanja program dan kegiatan. yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Pencapaian kinerja belanja SKPD merupakan antara indikator target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, seberapa besar SKPD mampu merealisasikan program dan kegiatannya dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan SKPD. Pencapaian kinerja belanja SKPD Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar [3.6]

Grafik tren Realisasi total belanja
Tahun 2022-2025

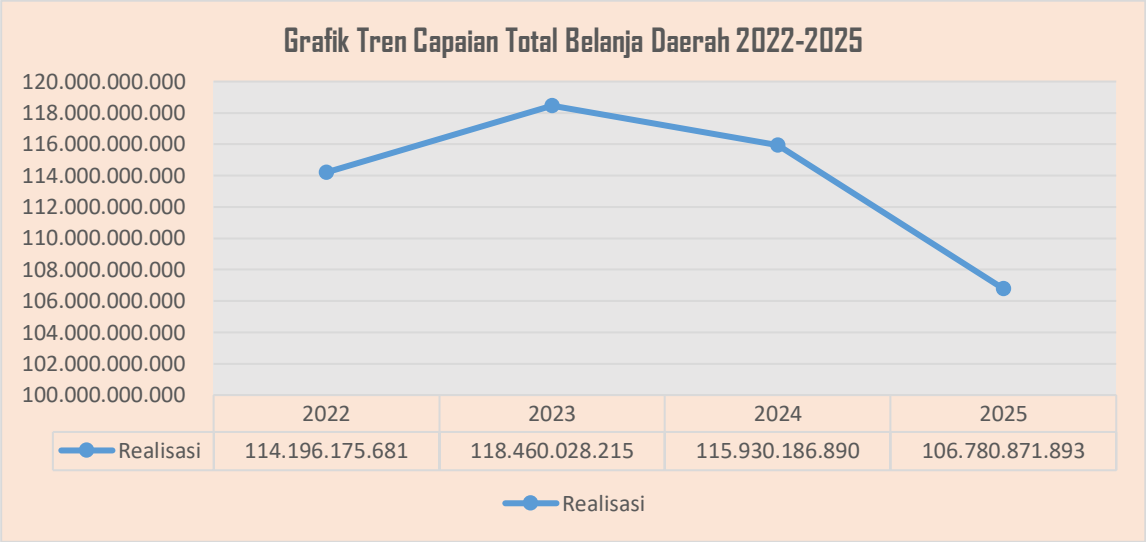

Porsi anggaran masing-masing belanja daerah tahun anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.105.347.195.774,75 (96,34%) dari total anggaran sejumlah Rp.108.701.582.312,00. Persentase ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja operasi tahun 2024 sejumlah Rp.112.209.144.780,20 (94,17%).

- Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebesarRp.2.131.986.261,00 dan terealisasi sejumlah Rp.1.433.676.119,00 atau 67,25 persen. Persentase ini lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.3.721.042.110,00 (83,12%).

Gambar [3.7]

Perbandingan realisasi anggaran belanja
Tahun 2025 dengan 2024

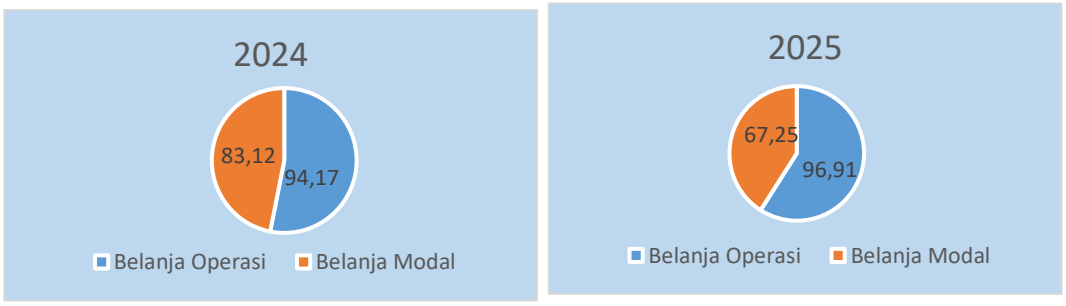

Belanja Operasi pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp.108.701.582.312, terealisasi sejumlah Rp.105.347.195.774,75 atau 96,34 persen mengalami peningkatan realisasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,17 persen. Realisasi belanja operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai dianggarkan pada tahun 2025 sejumlah Rp.70.897.568.462,47, terealisasi sejumlah Rp.70.191.130.509,00 atau 99,00 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah Rp. 75.978.849.916,00 atau 99,68 persen.
- Belanja Barang/Jasa tahun 2025 dianggarkan sejumlah Rp.37.804.013.849,53 terealisasi sejumlah Rp.35.156.065.265,75 atau 93,00 persen, tidak mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84,76 persen

Tabel [3.2]

Pencapaian Kinerja Belanja

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**100,192,336,260.94**	**97,119,780,610**	**96.93**	**99.78**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**94,444,651,086.88**	**92,261,810,112**	**97.69**	**99.85**
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240,861,530.93	222,752,980	92.48	100
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159,867,266.50	150,462,050.00	94.12	100
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,171,500.00	5,219,000.00	72.77	100
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,822,764.43	67,071,930.00	90.86	100
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,824,374,617.51	74,030,197,550	98.94	99.93
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73,211,805,017.51	72,498,143,048.00	99.03	99.93
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,601,088,000.00	1,522,416,000.00	95.09	100
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,481,600.00	9,638,502.00	83.95	100
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94,100,565.49	87,727,363.00	93.23	100
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94,100,565.49	87,727,363.00	93.23	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	326,821,982.88	237,503,540	72.67	85.17
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	123,924,582.88	104,094,075.00	84.00	94.62
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	113,032,600.00	88,567,065.00	78.36	93.42
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	53,157,400.00	15,183,000.00	28.56	39.7
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36,707,400.00	29,659,400.00	80.80	93.73
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97,500,000.00	92,710,000	95.09	100
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97,500,000.00	92,710,000.00	95.09	100
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0.00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,006,282,149.46	6,368,707,796	90.90	99.39
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000.00	72,186,800.00	90.23	100
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471,386,200.00	260,047,500.00	55.17	100
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	413,234,896.00	410,463,000.00	99.33	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	602,419,400.00	561,090,500.00	93.14	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,228,712,300.00	4,051,428,000.00	95.81	100
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49,980,000.00	48,000,000.00	96.04	100
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000,000.00	89,407,500.00	89.41	100
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938,583,088.54	759,783,662.00	80.95	95.43
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	121,966,264.92	116,300,834.00	95.35	100
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	0	0	0	0

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
	Elektronik pada SKPD				
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,337,890,050.00	2,181,468,916	93.31	100
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	464,860,000.00	355,969,000.00	76.58	100
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,873,030,050.00	1,825,499,916.00	97.46	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,057,838,089.91	4,007,649,259	98.76	100
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,290,000.00	17,279,300.00	89.58	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,770,733,478.00	1,729,459,516.00	97.67	100
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210,000,000.00	209,100,000.00	99.57	100
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,057,814,611.91	2,051,810,443.00	99.71	100
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,458,982,100.70	5,033,092,708.00	92.20	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	943,575,016.00	807,939,618.00	85.63	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262,698,668.00	236,394,668.00	89.99	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,252,708,416.70	3,988,758,422.00	93.79	100
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**376,904,800.00**	**332,672,731**	**88.26**	**98.87**
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	164,903,000.00	155,782,419	94.47	100
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	164,903,000.00	155,782,419.00	94.47	100
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	151,798,400.00	135,841,312.00	89.49	97.19
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	151,798,400.00	135,841,312.00	89.49	97.19

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	60,203,400.00	41,049,000.00	68.18	100
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	60,203,400.00	41,049,000.00	68.18	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**5,370,780,374.06**	**4,525,297,767.00**	**84.26**	**98.68**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,370,780,374.06	4,525,297,767	84.26	98.68
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	258,462,894.00	224,899,618.00	87.01	95.83
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	244,767,000.00	215,708,468.00	88.13	97.52
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,725,768,600.00	1,529,860,500.00	88.65	100
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	908,373,353.89	622,122,730.00	68.49	96.53
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,469,527,413.54	1,234,722,832.00	84.02	100
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	12,600,000.00	450,000.00	3.57	20.57
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	95,803,400.00	92,855,645.00	96.92	100
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40,893,000.00	33,029,116.00	80.77	96.18
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	284,998,870.54	273,086,552.00	95.82	100
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	116,642,032.15	110,518,180.00	94.75	100
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	67,550,309.94	53,613,780.00	79.37	97.13
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94,704,700.00	89,527,246.00	94.53	90.49
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50,688,800.00	44,903,100.00	88.59	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
JUMLAH		100,192,336,260.94	97,119,780,610.00	96.93	99.78

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0001	UPT PPD BATAM CENTRE	3,232,910,743.27	2,887,305,915.75	89.31	96.27
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,133,298,369.48	1,967,378,154.75	92.22	99.8
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0.00	0
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0.00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995,398,004.48	841,826,270.00	84.57	99.57
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,531,400.00	10,053,000.00	80.22	100
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194,937,300.00	103,020,000.00	52.85	100
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,200,000.00	34,200,000.00	100.00	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	243,040,800.00	203,485,500.00	83.72	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	405,608,783.00	389,909,000.00	96.13	98.96
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0.00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105,079,721.48	101,158,770.00	96.27	99.54

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,426,400.00	192,320,292.00	96.44	100
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,661,400.00	3,653,000.00	99.77	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133,765,000.00	126,667,292.00	94.69	100
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,000,000.00	62,000,000.00	100.00	100
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938,473,965.00	933,231,592.75	99.44	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	878,423,965.00	873,266,592.75	99.41	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,050,000.00	59,965,000.00	99.86	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1,099,612,373.79**	**919,927,761.00**	**83.66**	**89.43**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,099,612,373.79	919,927,761.00	83.66	89.43
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	185,880,000.00	185,880,000.00	100.00	100
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	25,563,500.00	25,507,400.00	99.78	100
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450,293,564.72	379,715,009.00	84.33	92.82
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	437,875,309.07	328,825,352.00	75.10	80.84
	JUMLAH	**3,232,910,743.27**	**2,887,305,915.75**	**89.31**	**96.27**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0002	**UPT PPD TANJUNGPINANG**	**1,951,590,732.17**	**1,794,076,038**	**91.93**	**99.72**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1,105,153,311**	**984,819,992**	**89.11**	**99.6**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,762,440	24,681,960	99.67	99.98
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,762,440	24,681,960	99.67	99.98
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424,836,435	358,248,444	84.33	99.56
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,038,470	14,439,260	80.05	100
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,262,116	33,737,999	0.00	100
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	0.00	0.00
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138,009,711	107,851,512	78.15	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,363,798	49,277,430	81.63	99.59
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,990,000	5,760,000	96.16	96.16
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,831,500	2,220,000	57.94	64.2
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160,340,840	144,962,243	90.41	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273,596,746	247,735,484	90.55	99.06
5.02.01.1.08.0001	Penyedia Jasa Surat Menyurat	3,892,400	3,530,000	90.69	98.27
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267,199,346	244,205,484	91.39	100
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,505,000	-	0.00	0

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381,957,690	354,154,104	92.72	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205,030,500	199,155,750	97.13	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58,540,000	56,510,000	96.53	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	118,387,190	98,488,354	83.19	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**846,437,421**	**809,256,046**	**95.61**	**99.88**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	846,437,421	809,256,046	95.61	99.88
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	210,657,735	198,562,959	94.26	100
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	38,671,000	36,093,665	93.34	99.46
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	504,370,927	484,704,487	96.10	100
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92,737,759	89,894,935	96.93	99.14
	JUMLAH	**1,951,590,732.17**	**1,794,076,038**	**91.93**	**99.72**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0003	**UPT PPD BINTAN**	**1,062,746,989.23**	**990,790,181.00**	**93.23**	**96.04**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**741,162,834.57**	**709,007,287.00**	**95.66**	**98.72**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,550,000.00	50,582,700.00	94.46	100
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,550,000.00	50,582,700.00	94.46	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195,129,492.35	184,872,605.00	94.74	100
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,256,500.00	7,104,000.00	86.04	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,081,600.00	69,734,807.00	92.88	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52,115,800.00	48,882,475.00	93.80	100
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59,675,592.35	59,151,323.00	99.12	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133,726,144.00	121,686,640.00	91.00	92.9
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124,226,144.00	112,186,640.00	90.31	92.36
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358,757,198.22	351,865,342.00	98.08	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan kendaran Dinas	216,117,000.00	211,125,250.00	97.69	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	30,050,000.00	29,750,000.00	99.00	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	112,590,198.22	110,990,092.00	98.58	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**321,584,154.66**	**281,782,894.00**	**87.62**	**89.87**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	321,584,154.66	281,782,894.00	87.62	89.87
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	110,178,169.77	103,135,697.00	93.61	97.28
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	18,996,000.00	18,340,500.00	96.55	98.49
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	47,897,984.89	47,122,447.00	98.38	100
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	144,512,000.00	113,184,250.00	78.32	79.73

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
	JUMLAH	1,062,746,989.23	990,790,181.00	93.23	96.04

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0004	UPT PPD KARIMUN	997,838,243.25	845,090,497.00	84.69	99.92
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	680,585,504.95	545,509,623.00	80.15	100
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,676,235.03	213,246,853.00	85.07	100
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,116,748.00	3,014,504.00	0	100
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,593,229.00	21,629,200.00	84.51	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,573,880.00	30,276,000.00	72.82	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,190,000.00	17,038,500.00	99.12	100
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,684,500.00	4,678,920.00	99.88	100
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158,517,878.03	136,609,729.00	86.18	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,129,900.00	194,617,787.00	67.55	100
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,676,100.00	6,302,980.00	94.41	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281,453,800.00	188,314,807.00	66.91	100
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141,779,369.92	137,644,983.00	97.08	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,165,000.00	57,151,850.00	99.98	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,600,500.00	21,283,600.00	94.17	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62,013,869.92	59,209,533.00	95.48	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**317,252,738.30**	**299,580,874.00**	**94.43**	**99.76**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	317,252,738.30	299,580,874.00	94.43	99.76
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	105,503,151.60	97,129,015.00	92.06	99.27
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3,750,000.00	3,661,900.00	97.65	100
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141,609,386.70	136,189,959.00	96.17	100
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	66,390,200.00	62,600,000.00	94.29	100
	JUMLAH	**997,838,243.25**	**845,090,497.00**	**84.69**	**99.92**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0005	**UPT PPD LINGGA**	**511,736,913.83**	**487,586,373.00**	**95.28**	**97.38**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**256,786,361.00**	**241,663,558.00**	**94.11**	**96.65**
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102,316,271.00	96,841,780.00	94.65	97.77
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,014,025.00	990,000.00	97.63	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,998,630.00	23,497,900.00	90.38	91.23
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,127,616.00	6,713,280.00	94.19	99.98
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	0
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,980,000.00	1,860,000.00	93.94	99
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,196,000.00	63,780,600.00	96.35	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,072,000.00	59,651,858.00	91.67	90.28
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,480,000.00	2,400,000.00	96.77	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,592,000.00	57,251,858.00	91.47	89.9
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan jasa Peralatan kantor	-	-	0.00	0
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,398,090.00	85,169,920.00	95.27	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,200,000.00	47,626,000.00	93.02	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6,344,170.00	5,690,000.00	89.69	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	31,853,920.00	31,853,920.00	100.00	100
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	254,950,552.83	245,922,815.00	96.46	98.11

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	254,950,552.83	245,922,815.00	96.46	98.11
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	49,086,573.27	45,173,688.00	92.03	99.18
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58,087,426.70	57,535,880.00	99.05	99.85
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	73,222,552.86	70,107,647.00	95.75	95
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	74,554,000.00	73,105,600.00	98.06	99.12
	JUMLAH	**511,736,913.83**	**487,586,373.00**	**95.28**	**97.38**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0006	**UPT PPD NATUNA**	**633,537,771.03**	**495,808,039.00**	**78.26**	**90.57**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**462,097,866.06**	**340,361,552.00**	**73.66**	**89.33**
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251,557,658.25	189,718,861.00	75.42	90.2
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,120,900.00	34,743,000.00	60.82	76.92
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,723,000.00	18,673,340.00	45.85	85.12
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,713,758.25	136,302,521.00	88.67	96.49
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,173,600.00	59,617,923.00	62.64	99.5
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	4,000,000.00	88.89	89.44
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,673,600.00	55,617,923.00	61.34	100
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,366,607.81	91,024,768.00	78.90	79.04

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan kendaran Dinas	77,410,000.00	53,168,878.00	68.68	68.77
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	6,100,000.00	6,000,000.00	98.36	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	31,856,607.81	31,855,890.00	100.00	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**171,439,904.97**	**155,446,487.00**	**90.67**	**93.92**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	171,439,904.97	155,446,487.00	90.67	93.92
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25,800,000.00	25,800,000.00	100.00	100
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	96,639,904.97	86,586,487.00	89.60	95.36
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	49,000,000.00	43,060,000.00	87.88	87.88
	JUMLAH	**633,537,771.03**	**495,808,039.00**	**78.26**	**90.57**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0007	**UPT PPD ANAMBAS**	**415,953,985.15**	**398,295,368.00**	**95.75**	**100**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**203,632,047.00**	**191,806,361.00**	**94.19**	**100**
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129,981,347.00	119,487,672.00	91.93	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,635,587.00	39,555,960.00	84.82	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22,190,760.00	21,690,712.00	97.75	100
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61,155,000.00	58,241,000.00	95.24	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,610,700.00	58,392,689.00	97.96	100
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,150,000.00	2,150,000.00	100.00	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	57,460,700.00	56,242,689.00	97.88	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
	Daya Air dan Listrik				
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,040,000.00	13,926,000.00	99.19	100
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,710,000.00	10,596,000.00	98.94	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	3,330,000.00	3,330,000.00	100.00	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**212,321,938.15**	**206,489,007.00**	**97.25**	**100**
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	212,321,938.15	206,489,007.00	97.25	100
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	134,408,477.44	131,532,001.00	97.86	100
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	77,913,460.71	74,957,006.00	96.21	100
	JUMLAH	**415,953,985.15**	**398,295,368.00**	**95.75**	**100**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0008	**UPT PPD BATU AJI**	**896,905,519.09**	**850,311,659**	**94.81**	**100**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**643,074,884.71**	**605,028,030**	**94.08**	**100**
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**321,487,075.98**	**297,972,930**	**92.69**	**100**
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,781,400.00	7,191,500	92.42	100
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,817,700.00	24,815,000	89.21	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194,207,200.00	183,066,800	94.26	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65,063,600.00	60,349,000	92.75	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,617,175.98	22,550,630	84.72	10
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**167,139,680.00**	**159,164,394**	**95.23**	**100**
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,081,200.00	2,043,500	98.19	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,058,480.00	109,120,894	93.22	100
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,000,000.00	48,000,000	100.00	100
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154,448,128.73**	**147,890,706**	**95.75**	**100**
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,800,000.00	59,720,000	99.87	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,460,000.00	11,833,500	76.54	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79,188,128.73	76,337,206.00	96.40	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**253,830,634.38**	**245,283,629**	**96.63**	**100**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**253,830,634.38**	**245,283,629**	**96.63**	**100**
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	111,875,754.48	106,177,034	94.91	100
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	141,954,879.90	139,106,595	97.99	100
	JUMLAH	**896,905,519.09**	**850,311,659**	**94.81**	**100**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0009	**UPT PPD KIJANG**	**555,180,161.29**	**519,597,770**	**93.59**	**99.87**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**400,403,433.65**	**372,801,238**	**93.11**	**99.98**
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162,346,100.00**	**139,110,330**	**85.69**	**99.98**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,836,800.00	3,791,760	78.39	100
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,283,900.00	17,926,500	76.99	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,177,200.00	46,310,310	78.26	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56,438,200.00	53,509,000	94.81	100
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,184,400.00	3,642,840	87.06	100
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,445,600.00	2,232,720	91.30	98.66
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,980,000.00	11,697,200	97.64	100
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101,797,000.00**	**98,878,111**	**97.13**	**100**
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,480,000.00	2,180,000	87.90	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,215,000.00	85,166,111	97.65	100
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,102,000.00	11,532,000	95.29	100
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136,260,333.65**	**134,812,797**	**98.94**	**99.98**
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96,260,000.00	95,918,700	99.65	99.97
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,880,000.00	6,775,000	85.98	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	32,120,333.65	32,119,097	100.00	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**154,776,727.64**	**146,796,532**	**94.84**	**99.58**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**154,776,727.64**	**146,796,532**	**94.84**	**99.58**
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	40,804,625.00	36,018,000	88.27	98.47
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2,778,000.00	2,749,500	98.97	99.05

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp).	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	46,180,302.64	43,366,732	93.91	100
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65,013,800.00	64,662,300	99.46	100
	JUMLAH	**555,180,161.29**	**519,597,770**	**93.59**	**99.87**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.26.0010	**UPT PPD TANJUNG BATU**	**382,831,253.75**	**370,126,014**	**96.68**	**100**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**276,750,079**	**266,123,611**	**96.16**	**100**
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**107,870,150**	**100,786,125**	**93.43**	**100**
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,565,000	4,468,860	97.89	100
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,984,500	23,041,600	88.67	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37,728,650	36,483,950	96.70	100
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,592,000	36,791,715	92.93	100
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52,368,900**	**49,957,476**	**95.40**	**100**
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100.00	100

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,368,900	46,957,476	95.12	100
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**116,511,029**	**115,380,010**	**99.03**	**100**
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44,060,000	44,040,000	99.95	100
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,720,000	8,635,000	99.03	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	63,731,029	62,705,010	98.39	100
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**106,081,175**	**104,002,403**	**98.04**	**100**
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**106,081,175**	**104,002,403**	**98.04**	**94.74**
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16,311,000	16,189,067	99.25	99.49
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	89,770,175	87,813,336	97.82	93.88
	JUMLAH	**382,831,254**	**370,126,014**	96.68	**100**

Belanja

Target Kinerja Keuangan secara umum adalah berupa Pendapatan dan Belanja. Unsur belanja dan pembiayaan adalah anggaran dan realisasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk fungsi keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.110.833.568.573,00. Anggaran tersebut diperuntukan untuk belanja pegawai dan belanja program dan kegiatan yaitu pelaksanaan sub kegiatan sebanyak 48 (*empat puluh delapan*) yang tersebar dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 3 (tiga) program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 106.780.871.893,75 dengan capaian realisasi keuangan 96,34 persen dan realisasi fisik sebesar 99,70% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 110.833.568.573,00. Dengan rincian sebagai berikut:

a. **Belanja Pegawai** pagu anggaran sebesar Rp. 70.897.568.462,47,- dapat direalisasikan sebesar Rp.70.191.130.509,00,- (99,00%) terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 706.437.953,47- (0,99%) disebabkan selisih pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, yang diterima disesuaikan dengan capaian target pendapatan.

b. **Belanja Barang dan Jasa** dengan target anggaran sebesar Rp.37.804.013.849,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.35.156.065.265,75.,- (93,00%) terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 2.647.948.583,25,- (7,04%) dikarenakan :
   - Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa Belanja barang/jasa mengalami penundaan pembayaran. Total anggaran yang merupakan hutang belanja karena penundaan pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.083.668.630,00, dan akan dilakukan review terhadap belanja barang dan jasa untuk memastikan tidak ada gagal bayar akibat efisiensi anggaran serta akan menjadi prioritas dalam pembayaran tahun anggaran 2026.
   - Selisih harga negosiasi dengan harga perkiraan sendiri dalam proses pengadaan.

c. **Belanja Modal** dalam tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.131.986.261,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.433.676.119,00,- (67,25) terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar

Rp. 698.310.142,00,- atau (32,75%) disebabkan selisih harga negosiasi dengan harga perkiraan sendiri dalam proses pengadaan, serta adanya belanja yang sudah terealisasi secara fisik tetapi terjadi penundaan pembayaran ditahun 2025.

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

a. Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025 pada belanja program dan kegiatan tingkat capaiannya relatif tinggi yaitu sebesar 96,34 persen mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan dari tahun periode sebelumnya(2024) sebesar 93,77 persen. Total belanja yang terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp.106.780.871.893,00 dari target anggaran Rp. 110.833.568.573,00, atau mencapai 96,34 persen dan Realisasi fisik mencapai 98,14 persen. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala/permasalahan baik dalam proses pengadaan dan pembayaran, hanya terdapat selisih sisa pembiayaan anggaran dari nilai penawaran/negosiasi belanja barang/jasa yang lebih rendah dari pagu anggaran.

b. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa Belanja barang/jasa dan belanja modal mengalami penundaan pembayaran dan menjadi hutang kewajiban jangka pendek yang akan diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Total belanja yang mengalami penundaan pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2025 sejumlah Rp.1.083.668.630,00.

c. Terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya rendah dibandingkan yang lainnya yaitu berkisar antara 0,00% s/d 79% hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi nilai minimal standar TKDN, dan waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu singkat menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana

dengan maksimal sehingga mempengaruhi tingkat capaian keuangan secara keseluruhan. Adapun kegiatan yang capaian keuangannya sedikit rendah berkisar antara 0.00% s/d 79% (kegiatan yang yang kinerjanya lebih rendah dibawah 80%) yaitu sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi keuangan 72,77 persen (sekretariat);
2. Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah, realisasi keuangan 60,54 persen (Bidang Pendapatan)
3. Sub kegiatan Pengadaan Mebel realisasi keuangan 76,58 persen (sekretariat);
4. Sub kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, realisasi keuangan 68,18 persen (Bidang Pengawasan);
5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah realisasi keuangan 68,49 persen (Bidang Pengembangan);
6. Sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, realisasi keuangan 3,57 persen (Bidang Pengembangan);
7. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , realisasi keuangan 52,85 persen (UPT PPD Batam Centre);
8. Sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, realisasi keuangan 75,10 persen (UPT PPD Batam Centre);
9. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 78,15 persen (UPT PPD Tanjungpinang);
10. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, realisasi 57,94 persen (UPT PPD Tanjungpinang);
11. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 72,82 persen (UPT PPD Karimun);
12. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan 66,91 persen (UPT PPD Karimun);
13. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan

60,82 persen (UPT PPD Natuna);

14. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi keuangan 45,85 persen (UPT PPD Natuna);
15. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan 61,34 persen (UPT PPD Natuna);
16. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perizinan kendaran Dinas, realisasi keuangan 68,68 persen (UPT PPD Natuna);
17. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 76,54 persen (UPT PPD Batuaji);
18. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , realisasi keuangan 78,39 persen (UPT PPD Kijang);
19. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi keuangan 76,99 persen (UPT PPD Kijang);
20. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 78,26 persen (UPT PPD Kijang);

BAB
4

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward acrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk

setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip

pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
    1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
    2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

   Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

   Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya

berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.
Pengakuan Beban Persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
   SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik,

yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
  a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
  c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:
  a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
  b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
  c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
  d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB
5

BAB V
PENJELASAN POS–POS NERACA

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel [5.1] Pendapatan LRA

Kode Rekening	Pendapatan	Target Kinerja (Rp.)	Realisasi Target Kinerja (Rp.)	%
4.	**Pendapatan**	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	89,45
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	1.647.032.914.528,21	1.473.196.517.665,62	89,45
4.1.01	**Pajak Daerah**	**1.617.238.624.316,00**	**1.447.285.058.158,50**	89,49
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36
4.1.01.04	Pajak air Permukaan	33.933.643..819,00	33.017.182.076,00	97,30
4.1.01.05	Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17
4.1.01.18	Opsen Pajak MBLB	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97
4.1.02	Retribusi Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78

1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.473.196.517.665,62 atau 89,45 persen dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 1.647.032.914.528,21. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.447.285.058.158,00 atau 89,49% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 1.617.238.624.316,00.

Tabel [5.2]

Rincian Pendapatan Pajak Daerah

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
PENDAPATAN	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**	**1.793.639.631.181,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**	**1.792.346.931.181,00**
Pendapatan Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.177.704.385.140,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
Pajak air Permukaan	33.933.643..819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Pajak Opsen MBLB	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00
Retribusi Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00	71.775.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.561.041,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00

Pendapatan Pajak Daerah tidak mencapai target dikarenakan:

a. Jenis PKB dan BBNKB ddipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta penurunan penjualan kendaraan bermotor yang disebabkan factor ekonomi makro dan daya beli masyarakat yg menurun, serta dampak dari implementasi UU HKPD No 1 Tahun 2022, insentif fiskal dan Opsen Pajak;
b. Jenis pajak air permukaan dipengaruhi oleh tarif dan alat ukur meteran belum tersedia, sehingga sangat menjadi kendala dalam menentukan/ menetapkan tarif air permukaan;
c. Pada Realisasi Pajak alat berat dan Opsen pajak MBLB selain dipengaruhi oleh dampak kebijakan UU HKPD bahwa pajak baru memerlukan masa penyesuaian/sosialisasi, dan perlunya sinkronisasi data base alat berat bersama OPD teknis (Disnaker, ESDM, PTSP).

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2025 sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga mencapai 100 persen sebesar Rp. 52.980.000,00 dari anggaran yang ditargetkan Rp.52.980.000,00.

Tabel [5.3]

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
RETRIBUSI DAERAH	**52.980.000,00**	**52.980.000,00**	**100,00**	**71.775.000,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00	71.775.000,00

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 sebesar Rp.25858.479.507,12 atau 86,94% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.29.741.310.212,21,00. Dengan rincian berikut:

Tabel [5.4]

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**86,94**	**14.570.561.041,00**
Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94	14.570.561.041,00
Denda Pajak Kendaraan Bermotor/PKB	13.955.066.122,21	9.948.896.000,00	71,29	14.542.181.200,00
Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.787.600,00	2.837.9001,00	101,87	00,00
Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
Denda Pajak air Permukaan	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00	666.093,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.292.700.000,00

2. Penjelasan Pos-Pos Belanja

Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel [5.5]
Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Kepri
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	
	Rp.	Rp.	%
BELANJA	**110.833.568.573,00**	**106.780.871.893,20**	**96,34**
BELANJA OPERASI	**108.701.582.312,00**	**105.347.195.774,75**	**96,91**
Belanja Pegawai	70.897.568.462,47	70.191.130.509,00	99,00
Belanja Barang/Jasa	37.804.013.849,00	35.156.065.265,75	93,00

BELANJA MODAL	**2.131.986.261,00**	**1.433.676.119,00**	**67,25**
Belanja Peralatan dan Mesin	2.096.233.261,00	1.401.871.119,00	66,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96

2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 mencapai Rp.105.347.195.774,75 atau 96,91 persen dari anggaran belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp.108.701.582.312,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp.70.191.130.509,00 atau 99,00 persen dari target anggaran yang disediakan sejumlah Rp.70.897.568.462,47, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel [5.6]

Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
Belanja Pegawai	**70.897.568.462,47**	**70.191.130.509,00**	**99,00**	**75.978.849.916,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.644.959.889,92	19.290.557.261,00	98,20	13.711.559.643,00
Belanja Gaji Pokok ASN	14.521.106.379,03	14.399.183.500,00	99,16	9.922.338.150,00
Belanja Gaji Pokok PNS	10.048.754.019,00	9.973.714.700,00	99,25	9.922.338.150,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.068.831.325,00	1.058.340.442,00	99,02	1.050.358.218,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	503.580.000,00	497.840.000,00	98,86	499.260.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	910.418.007,00	880.120.260,00	96,67	610.573.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.106.934,00	9.764.914,00	64,64	13.362.576,00

Belanja Pembulatan Gaji ASN	442.461,97	242.503,00	54,81	141.453,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.278.895.476,87	1.200.422.050,00	93,86	1.010.753.258,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.377.089,01	31.042.905,00	98,93	20.436.664,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	94.130.025,00	93.127.513,00	98,93	61.310.304,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	49.883.274,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**51.252.608.572,55**	**50.900.573.248,00**	**99,31**	**25.986.783.493,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.159.130.938,00	14.987.215.957,00	98,87	14.946.861.121,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.433.016.998,00	1.412.717.581,00	98,58	1.423.198.717,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.696.349.614,00	9.617.624.590,00	99,19	9.616.723.655,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.964.111.022,55	24.883.015.120,00	99,68	36.280.506.780,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	8.864.802.989,28	8.835.118.721,00	99,67	13.315.589.697,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.168.387.756,00	5.165.704.270,00	99,95	11.354.921.446,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.203.407.147,00	10.161.640.029,00	99,59	9.938.977.637,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	727.513.130,27	720.552.100,00	99,04	0,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang/Jasa Tahun 2025 sebesar Rp.35.156.065.265,75 atau 93,00% dari target anggaran yang disediakan sebesar Rp.37.804.013.849,53. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel [5.7]

Rincian Belanja Barang/Jasa

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
Belanja Barang/Jasa	**42.747.835.649,00**	**36.233.294.864,00**	**84,76**	**40.687.190.270,00**
Belanja Barang dan Jasa	37.804.013.849,53	35.156.065.265,75	93,00	36.230.294.864,20
Belanja Barang	10.566.031.475,20	9.564.456.391,00	90,52	7.161.651.592,00
Belanja Barang Pakai Habis	10.566.031.475,20	9.564.456.391,00	90,52	7.157.651.592,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	472.318.700,00	298.664.000,00	63,23	836.760.790,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.268.170,00	2.947.550,00	90,19	8.204.400,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.485.212.000,00	1.459.042.100,00	98,24	1.435.820.500,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	54.305.150,00	52.915.000,00	97,44	65.951.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	2.557.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	62.419.000,00	62.057.500,00	99,42	38.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	443.949.430,00	390.913.364,00	88,05	358.974.770,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	411.045.388,00	378.919.910,00	92,18	363.819.025,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.986.108.835,00	4.725.119.533,00	94,77	1.245.270.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	48.186.400,00	47.870.000,00	99,34	61.530.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	85.292.777,20	64.814.425,00	75,99	37.236.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	673.495.826,00	586.363.975,00	87,06	477.093.165,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	214.945.192,00	182.509.280,00	84,91	194.404.742,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	136.568.543,00	120.686.684,00	88,37	104.376.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	2.847.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	256.950.324,00	187.368.770,00	72,92	269.765.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.952.000,00	17.082.980,00	95,16	106.750.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.541.300,00	1.980.760,00	55,93	2.610.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	940.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	470.910.000,00	335.391.900,00	71,22	588.721.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.400.000,00	1.620.000,00	67,50	17.609.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	538.855.000,00	457.714.000,00	84,94	521.213.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	97.500.000,00	92.710.000,00	95,09	116.620.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	85.057.440,00	83.778.660,00	98,50	166.950.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	15.750.000,00	13.986.000,00	88,80	67.610.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	30.497.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	11.840.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Jasa	20.012.666.851,63	18.959.388.674,75	94,74	21.607.569.507,00
Belanja Jasa Kantor	14.886.956.301,26	13.971.352.887,00	93,85	16.881.564.422,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	87.305.000,00	71.605.000,00	82,02	92.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	563.350.000,00	512.600.000,00	90,99	835.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.300.000,00	25.000.000,00	98,81	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.412.672.236,96	4.307.722.749,00	97,62	8.857.380.338,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	298.332.935,68	277.463.272,00	93,00	368.309.616,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.593.358.252,00	1.590.435.832,00	99,82	1.002.198.534,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	140.202.765,62	123.400.000,00	88,02	0,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	51.473.220,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.222.300,00	1.495.300,00	35,41	1.764.500,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	276.134.400,00	237.600.000,00	86,05	132.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.578.710.000,00	1.433.715.500,00	90,82	1.726.584.000,00
Belanja Tagihan Telepon	160.800.000,00	150.556.891,00	93,63	79.119.205,00
Belanja Tagihan Air	124.686.344,00	101.465.096,00	81,38	79.854.363,00
Belanja Tagihan Listrik	2.560.658.189,00	2.373.982.361,00	92,71	2.471.635.882,00

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	61.380.000,00	59.400.000,00	96,77	69.883.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.285.316.590,00	1.085.469.866,00	84,45	1.053.361.458,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	1.522.306,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	84.840.016,00	68.425.748,00	80,65	57.828.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.594.288.000,00	1.515.616.000,00	95,07	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.102.248,00	6.102.248,00	100,00	0,00
Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	20.967.024,00	20.967.024,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	854.133.855,33	824.729.144,75	96,56	626.692.491,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	244.397.634,59	236.149.666,00	96,63	509.465.617,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.659.669,85	14.068.113,00	95,96	30.439.238,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.891.635,89	17.671.787,00	93,54	38.049.171,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	576.184.915,00	556.839.578,75	96,64	48.738.465,00
Belanja Sewa Tanah	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	338.746.740,00	329.867.000,00	97,38	326.380.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	59.200.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	1.485.000,00	49,50	9.780.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.276.000,00	2.697.000,00	82,33	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	8.200.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	6.770.740,00	3.385.000,00	49,99	0,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	320.000.000,00	319.100.000,00	99,72	249.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.496.443.400,00	1.459.464.000,00	97,53	685.871.333,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.401.403.400,00	1.364.604.000,00	97,37	492.638.333,00
Belanja Sewa Hotel	71.280.000,00	71.160.000,00	99,83	57.942.000,00

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	23.760.000,00	23.700.000,00	99,75	135.291.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	110.000.000,00	56.550.000,00	51,41	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	110.000.000,00	56.550.000,00	51,41	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	89.133.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	79.133.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.314.236.555,04	2.305.275.643,00	99,61	2.985.928.261,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	708.505.538,00	706.100.282,00	99,66	1.085.682.815,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.680.919,00	620.262.230,00	99,93	937.864.536,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	920.002.219,00	914.082.928,00	99,36	962.380.910,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	65.047.879,04	64.830.203,00	99,67	0,00
Belanja Pemeliharaan	3.724.734.322,70	3.526.287.466,00	94,67	2.821.080.457,20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.434.689.338,00	1.270.617.896,00	88,56	988.285.232,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.940.000,00	15.940.000,00	100,00	31.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.140.000,00	0,00	0,00	18.503.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	731.246.000,00	631.970.328,00	86,42	466.425.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.530.000,00	44.180.800,00	84,11	65.857.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	150.000.000,00	148.300.000,00	98,87	83.628.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.812.170,00	22.735.000,00	95,48	30.810.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebe	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	30.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	248.641.668,00	242.414.768,00	97,50	195.526.332,00

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	153.379.500,00	126.077.000,00	82,20	64.905.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.290.044.984,70	2.255.669.570,00	98,50	1.832.795.225,20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.017.250.304,70	1.985.669.570,00	98,43	1.703.195.225,20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	272.794.680,00	270.000.000,00	98,98	129.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.167.731.200,00	2.773.082.734,00	87,54	4.639.993.308,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.167.731.200,00	2.773.082.734,00	87,54	4.639.993.308,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.858.619.400,00	2.476.932.734,00	86,65	3.316.026.933,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309.111.800,00	296.150.000,00	95,81	1.306.390.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	17.576.375,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	332.850.000,00	332.850.000,00	100,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	332.850.000,00	332.850.000,00	100,00	0,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	332.850.000,00	332.850.000,00	100,00	0,00

2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.433.676.119,00 atau 67,25% dari target anggaran belanja modal yang disediakan sejumlah Rp.2.131.986.261,00. Rincian atas realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebagai berikut sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2025 sejumlah Rp.1.401.871.119,00 atau 66,88% dari target anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp.2.096.233.261,00.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga biaya pembuatan tugu/tanda batas pada gedung dan bangunan.

Untuk tahun anggaran 2025 tidak tersedia target anggaran untuk Belanja Gedung dan Bangunan, seperti periode tahun (2024) realisasi pengadaannya sejumlah Rp.124.800.000,00 atau 99,16% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan pada tahun 2024 sebesar Rp.125.854.400,00.

c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya instalasi gardu listrik. Tahun 2025 tidak tersedia target anggaran untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya, termasuk juga belanja modal yang akan di reklasifikasi menjadi belanja barang/jasa. Pada tahun anggaran 2025 realisasi belanja modal asset tetap lainnya sejumlah Rp.31.805.000,00 atau 88,96 persen dari target anggaran sebesar Rp.35.753.000,00.

Tabel [5.8]

Rincian Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
Belanja Modal	**2.131.986.261,00**	**1.433.676.119,00**	**67,25**	**3.721.042.110,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.096.233.261,00	1.401.871.119,00	66,88	3.596.242.110,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	633.820.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	633.820.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	568.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.444.200,00	4.203.000,00	77,20	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.570.800,00	2.553.000,00	71,50	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	3.570.800,00	2.553.000,00	71,50	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.873.400,00	1.650.000,00	88,08	0,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.873.400,00	1.650.000,00	88,08	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	890.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	669.924.794,00	539.170.620,00	80,48	1.231.077.110,00
Belanja Modal Alat Kantor	136.526.000,00	11.932.500,00	8,74	83.750.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	108.891.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.635.000,00	11.932.500,00	43,18	83.750.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	472.693.794,00	466.533.120,00	98,70	197.203.500,00
Belanja Modal Mebel	49.122.082,00	47.523.120,00	96,74	105.410.500,00
Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00

Belanja Modal Alat Pendingin	413.234.896,00	410.463.000,00	99,33	55.435.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	8.090.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.336.816,00	8.547.000,00	82,69	22.768.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.705.000,00	60.705.000,00	100,00	950.123.610,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	47.115.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	60.705.000,00	60.705.000,00	100,00	40.440.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	845.568.610,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.564.400,00	22.000.000,00	89,56	329.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	265.110.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	13.310.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	251.800.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	14.564.400,00	12.000.000,00	82,39	7.700.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	14.564.400,00	12.000.000,00	82,39	7.700.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	56.690.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Belanja Modal Komputer	1.396.299.867,00	836.497.499,00	59,91	1.381.680.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	764.157.000,00	386.311.499,00	50,55	801.300.000,00
Belanja Modal Personal Computer	725.157.000,00	386.311.499,00	53,27	801.300.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	632.142.867,00	450.186.000,00	71,22	580.380.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	35.790.000,00	35.790.000,00	100,00	109.185.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	319.024.900,00	146.534.000,00	45,93	423.565.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	119.523.720,00	119.305.000,00	99,82	35.730.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	157.804.247,00	148.557.000,00	94,14	11.900.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	12.675.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	12.675.000,00
Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	12.675.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.753.000,00	31.805.000,00	88,96	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-	2.601.000,00	2.575.000,00	99,00	0,00

Lisensi dan Franchise				
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	33.152.000,00	29.230.000,00	88,17	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**2.131.986.261,00**	**1.433.676.119,00**	**67,25**	**3.721.042.110,00**

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp).	31 Desember 2024 (Rp).
Aset	106.774.965.676,80	108.640.131.360,79
Kewajiban	2.785.768.826,50	7.021.227.550,50
Ekuitas	108.747.773.287,30	105.048.576.247,29

I. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp.106.774.965.676,80	**Rp.108.640.131.360,79**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang. Aset dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara. Jumlah aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.106.774.965.676,80 atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp.108.640.131.360,79, ada pengurangan nilai asset sebesar Rp.1.865.165.683,99 pada tahun anggaran 2025.

Rincian aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)

Aset Lancar	53.388.772.018,59	56.555.184.803,58
Aset Tetap	53.450.995.009,21	52.178.755.260,21
Aset Lainnya	(64.801.351,00)	(93.808.703,00)
Jumlah	**106.774.965.676,80**	**108.640.131.360,79**

a. Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp. 53.388.772.018,59	**Rp. 56.555.184.803,58**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.53.388.772.018,59 dengan rincian sebagai berikut :

1)	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2024**
		Rp.0,00	**Rp. 3.000.000,00**

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan

pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 (Nihil).

2) Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp.99.618.122.631,00	**Rp. 99.618.122.631,00**

Piutang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 99.618.122.631,00. Piutang tersebut terdiri dari:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang PKB	10.884.323.341,00	10.884.323.341,00
Piutang BBNKB	16.908.905.620,00	16.908.905.620,00
Piutang PBBKB	39.688.597.082,00	39.688.597.082,00
Piutang PAP	32.136.296.588,00	32.136.296.588,00
Jumlah	**99.618.122.631,00**	**99.618.122.631,00**

3) Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp.0,00	**Rp.2.728..028.160,00**

Persediaan yang tercatat per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 (Nihil), Barang Persediaan yang tercatat terdiri dari Barang Pakai Habis meliputi

1. Alat Bahan Kegiatan Kantor (Nihil)
2. ATK (Nihil)
3. Bahan cetak (Nihil)

b. Aset Tetap

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp.53.450.995.009,21	**Rp.52.178.755.260,21**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel [5.9]

Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	8.962.550.572,00	8.962.550.572,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	56.801.480.568,95	55.529.240.819,95	1.272.239.749,00
3	Gedung dan Bangunan	41.738.650.488,00	41.738.650.488,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.358.823.900,00	1.358.823.900,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	75.639.000,00	75.639.000,00	0,00
	Jumlah	**53.450.995.009,21**	**52.178.755.260,21**	**1.272.239.749,00**
6	Akumulasi Penyusutan	(55.486.149.519,74)	(55.486.149.519,74)	0,00
	Total	**53.450.995.009,21**	**52.178.755.260,21**	**1.272.239.749,00**

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

	31 Desember 2025	**31 Desember 2024**
1) Tanah	**Rp.8.962.550.572,00**	**Rp. 8.962.550.572,00**

Nilai aset tanah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.8.962.550.572,00** tidak ada penambahan nilai/peningkatan (Rp.0.00) jika dibandingkan nilai aset tanah per 31 Desember

2024 yang tercatat sebesar **Rp.8.962.550.572,00**

2)	**Peralatan dan Mesin**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp.56.801.480.568,95	**Rp.55.529.240.819,95**

Nilai aset peralatan dan mesin Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 56.801.480.568,95** meningkat sebesar **Rp.1.272.239.749,00** jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 55.529.240.819,95**

3)	**Gedung Dan Bangunan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp.41.738.650.488,00	**Rp41.738.650.488,00**

Nilai aset gedung dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.41.738.650.488,00** tidak ada penambahan/peningkatan (Rp.0,00) jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. 41.738.650.488,00**.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp.1.358.823.900,00	Rp.1.358.823.900,00

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.1.358.823.900,00** tidak ada penambahan/peningkatan (Rp.0,00) jika dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp.1.358.823.900,00**.

5)	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp75.639.000,00	Rp75.639.000,00

Nilai aset tetap lainnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp75.639.000,00** tidak ada Penambahan/peningkatan **(Rp.0,00)** jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp75.639.000,00.**

6).	Aset Lainnya	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp.64.801.351,00)	(Rp. 93.808.703,00)

Nilai aset lainnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset lain-lain sebesar **Rp.(64.801.351,00)** seluruhnya merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya rusak berat/hilang yang dalam proses penghapusan dan administrasinya belum selesai, maka aset tersebut masih dicatat sebagai aset lain-lain. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp. (93.808.703,00).**

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp.2.785.768.826,50	**Rp.7.021.227.550,50**

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel [5.10]

Rincian Kewajiban

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	2.785.768.826,50	7.021.227.550,50	(4.235.458.724,00)
2	Utang Belanja	1.083.668.630,00	5.319.127.354,00	(4.235.458.724,00)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.702.100.196,50	1.702.100.196,50	0,00
	Jumlah	**2.785.768.826,50**	**7.021.227.550,50**	**(4.235.458.724,00)**

III.	**EKUITAS**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	DANA	**Rp.108.747.773.287,30**	**Rp. 105.048.576.247,29**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar **Rp.108.747.773.287,30** yang terdiri dari :

a.	**Ekuitas Dana Lancar**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
		Rp.1.475.203.416.707,17	**Rp. 1.781.465.845.538,09**

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 1.475.203.416.707,17** terdiri dari:

1.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp.4.052.696.679,25	**Rp. 7.516.666.244,80**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp.4.086.896.679,25 yang diperoleh dari perhitungan berikut:

Kas di bendahara pengeluaran	Rp.0,00
Hutang PFK	Rp.0,00
SiLPA	Rp.4.086.896.679,25

IV. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel [5.11]

Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LO

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
4	**PENDAPATAN-LO**	**1.648.357.017.028,21**	**1.474.491.221.665,62**	**89,45**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO**	**1.647.032.914.528,21**	**1.473.196.517.665,62**	**89,45**
4.1.01	Pajak daerah-LO	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49
4.1.02	Retribusi daerah-LO	52.980.000,00	52.980.000,00	100,00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,94

2. Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp. 1.473.196.517.665,62 atau 89,45 persen dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 1.647.032.914.528,21. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi pendapatan pajak daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp. 1.447.285.058.158,50 atau 89,49 persen dari jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.738.323.174.655,00

Tabel [5.12]

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah	1.617.238.624.316,00	1.447.285.058.158,50	89,49	1.777.704.385.140,00
Pajak Kendaraan Bermotor	444.109.779.594,00	405.307.682.591,00	91,26	596.081.883.938,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	399.572.412.018,00	273.480.737.600,00	68,44	522.716.638.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	478.452.376.124,00	489.750.163.677,00	102,36	490.605.194.542,00
Pajak air Permukaan	33.933.643.819,00	33.017.182.076,00	97,30	1.192.208.723,00
Pajak Rokok	180.651.107.585,00	174.288.290.965,00	96,48	167.108.459.437,00
Pajak Alat Berat	4.334.952.300,00	614.336.352,00	14,17	0,00
Pajak Opsen MBLB	76.184.352.876,00	70.826.664.897,50	92,97	0,00

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.52.980,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.52.980.000,00. Jika dibandingkan dengan periode anggaran tahun 2024, penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan, berkurang sejumlah Rp. (18.795.000) atau 26,19 persen.

c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 25.858.479.507,12 atau 86,94 persen dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 29.741.310.212,21. Jika dibandingkan dengan tahun (2024) mengalami kenaikan sebesar 77,50 persen atau sejumlah Rp. 11.290.139.266,12.

Tabel [5.13]

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025		REALISASI 2024
	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH-LO	**29.741.310.212,21**	**25.858.479.507,12**	**86,94**	**14.568.340.241,00**
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	29.741.310.212,21	25.858.479.507,12	86,36	**14.568.340.241,00**
Denda Pajak Kendaraan Bermotor-LO	13.955.066.122,21	9.948.896.000,00	53,68	18.339.025.680,00
Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	2.787.600,00	2.837.900,00	101,80	0,00
Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	0,00	91.312.431,00	0,00	27.713.748,00
Denda Pajak air Permukaan-LO	15.783.456.490,00	15.782.762.058,12	100,00	666.093,00
Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Denda Opsen Pajak MBLB-LO	0,00	32.671.118,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	1.324.102.500,00	1.294.704.000,00	97,78	1.558.954.082,00

3. Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi, dengan realisasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.104.336.381.205,74, dengan rincian :

Tabel [5.14]

Rincian Beban -LO

NOMOR REKENING	URAIAN	2025	2024
		Rp.	Rp.
1	2	3	4
8	**BEBAN**	**104.336.381.205,74**	**145.873.121.256,42**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**104.336.381.205,74**	**140.284.756.824,88**
8.1.01	Beban Pegawai	70.191.130.509,00	75.976.186.869,00
8.1.02	Beban Barang/Jasa	34.145.250.696,74	40.091.542.290,99
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	24,217.027.664,89
	JUMLAH	**104.336.381.205,74**	**140.284.756.824,88**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**0,00**	**5.588.364.431,54**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	4.718.416.708,54
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	834.773.008,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	33.661.935,00
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.512.780,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	5.588.364.431,54
	JUMLAH BEBAN	**104.336.381.205,74**	**145.873.121.256,42**

4. Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp.70.191.130.509,00, jika dibandingkan dengan realisasi beban pegawai pada tahun (2024) mengalami penurunan dengan pengurangan sebesar (7,61) persen atau sejumlah (Rp.5.785.056.360,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel [5.15]

Rincian Beban Pegawai

Uraian	2025 (Rp).	2024 (Rp).
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.290.557.261,00	13.708.896.596,00
Belanja Gaji Pokok ASN	14.399.183.500,00	9.922.338.150,00
Beban Gaji Pokok PNS	9.973.714.700,00	9.922.338.150,00
Beban Gaji Pokok PPPK	4.425.468.800,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.383.594.616,00	1.048.300.570,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.058.340.442,00	1.048.300.570,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	325.254.174,000,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	497.840.000,00	499.260.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	497.840.000,00	499.260.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	207.244.000,00	206.966.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	207.244.000,00	206.966.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	587.975.000,00	316.060.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	304.230.000,00	316.060.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	283.745.000,00 0,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	880.120.260,00	610.573.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	606.662.340,00	610.573.020,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	273.457.920,00	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.764.914,00	12.757.177,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.764.914,00	12.757.177,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	242.503,00	141.453,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	133.460,00	141.453,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	109.043,00	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.200.422.050,00	1.010.753.258,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	999.018.161,00	1.010.753.258,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	201.403.889,00	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	31.042.905,00	20.436.664,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.421.232,00	20.436.664,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10.621.673,00	
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	93.127.513,00	61.310.304,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	61.263.955,00	61.310.304,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	31.863.558,00	
Beban Tambahan Penghasilan ASN	50.900.573.248,00	25.986.783.493,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.987.215.957,00	14.946.861.121,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.987.215.957,00	14.946.861.121,00

Uraian	2025 (Rp).	2024 (Rp).
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.412.717.581,00	1.423.198.717,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.412.717.581,00	1.423.198.717,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.617.624.590,00	9.616.723.655,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	9.617.624.590,00	9.616.723.655,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.883.015.120,00	36.280.506.780,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	34.609.488.780,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	8.835.118.721,00	13.315.589.697,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.165.704.270,00	11.354.921.446,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.161.640.029,00	9.938.977.637,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	720.552.100,00	0,00
Belanja Honorarium	0,00	1.671.018.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	1.662.858.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.34.145.250.696,74, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah beban barang jasa pada tahun (2024), pengurangan sebesar (14,83) persen dari jumlah beban barang jasa Rp.40.091.542.290,99 (2024) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel [5.16]

Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	2025 (Rp).	2024 (Rp).
Belanja Barang/Jasa	**40.091.542.290,99**	**40.091.542.290,99**
Belanja Barang	9.883.511.485,00	9.251.139.118,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.883.511.485,00	9.216.879.118,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	216.755.000,00	868.340.790,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.947.550,00	8.204.400,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.459.042.100,00	1.435.820.500,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	52.915.000,00	65.951.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	2.557.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	62.057.500,00	38.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	686.807.424,00	445.407.330,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	364.278.810,00	444.772.925,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.396.164.367,00	2.981.555.766,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	47.870.000,00	62.060.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	112.774.425,00	50.776.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	849.146.475,00	572.288.665,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	145.265.080,00	233.265.942,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	122.544.684,00	103.697.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	2.847.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	23.280.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	427.658.770,00	87.215.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.082.980,00	110.880.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.980.760,00	3.078.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	940.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	412.891.900,00	598.721.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.620.000,00	17.609.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	313.234.000,00	665.693.000,00

Uraian	2025 (Rp).	2024 (Rp).
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	92.710.000,00	116.620.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	83.778.660,00	166.950.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	13.986.000,00	67.610.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	30.497.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	11.840.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	34.260.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	8.865.000,00
Belanja Jasa	18.211.933.849,74	22.831.854.569,79
Belanja Jasa Kantor	13.424.769.887,00	17.494.667.422,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.605.000,00	92.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	509.600.000,00	838.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.307.722.749,00	8.857.380.338,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	178.463.272,00	467.309.616,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.415.102.832,00	1.177.531.534,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	51.473.220,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.495.300,00	1.764.500,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	205.920.000,00	198.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.215.015.500,00	1.977.484.000,00
Belanja Tagihan Telepon	150.556.891,00	79.119.205,00
Belanja Tagihan Air	101.465.096,00	79.854.363,00
Belanja Tagihan Listrik	2.373.982.361,00	2.471.635.882,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	59.400.000,00	69.883.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.066.599.866,00	1.072.231.458,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.530.000,00	1.522.306,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	68.425.748,00	57.828.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	563.317.694,75	888.103.941,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	236.149.666,00	509.465.617,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.068.113,00	30.439.238,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.671.787,00	38.049.171,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	295.428.128,75	310.149.915,00

Uraian	2025 (Rp).	2024 (Rp).
Belanja Sewa Tanah	12.150.000,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.150.000,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	314.267.000,00	326.380.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	59.200.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.485.000,00	9.780.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	3.200.000,00	8.200.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	303.500.000,00	264.800.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.486.803.624,99	1.020.041.945,79
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.391.943.624,99	826.808.945,79
Belanja Sewa Hotel	71.160.000,00	57.942.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	23.700.000,00	135.291.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	89.133.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	10.000.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	79.133.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.305.275.643,00	2.985.928.261,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	706.100.282,00	1.085.682.815,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	620.262.230,00	937.864.536,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	914.082.928,00	962.380.910,00
Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	64.830.203,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	2.943.872.628,00	3.369.295.295,20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.021.561.228,00	1.237.341.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	31.880.000,00	31.880.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	18.503.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	466.425.800,00	466.425.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.857.100,00	65.857.100,00

Uraian	2025 (Rp).	2024 (Rp).
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	148.300.000,00	83.628.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.925.000,00	32.620.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	39.000.000,00	30.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	162.564.100,00	275.377.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	90.877.000,00	100.105.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.922.311.400,00	2.131.953.395,20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.751.311.400,00	1.937.553.395,20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	171.000.000,00	194.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.773.082.734,00	4.639.253.308,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.773.082.734,00	4.639.253.308,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.476.932.734,00	3.315.286.933,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	296.150.000,00	1.306.390.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	17.576.375,00

c) Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Penyisihan Piutang Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel [5.17]

Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	**0,00**	**24.217.027.664,89**
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	16.282.804.716,33
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Daerah (PKB)	0,00	16.282.804.716,33
Beban Penyisihan Piutang LainLain PAD yang Sah	0,00	7.934.222.948,56
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	7.934.222.948,56

d) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel [5.18]

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2024 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**0,00**	**5.588.364.431,54**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	4.718.416.708,54
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	834.773.008,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	33.661.935,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.512.780,00

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepulauan Riau Nomor 10/UMKGKR/VIIII/2004 pada tanggal 7 Agustus 2004, pembentukan Dinas pendapatan daerah pertama sekali guna melaksanakan perhimpunan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Gedung Graha Kepri Jalan Raja Isa No 8 Batam Centre sejak tahun 2007, dan Kantor Samsat UPTD PPD yang berada di wilayah 7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kepulauan Riau telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah mempunyai:

Tugas :

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah:

1. Kinerja Pelayanan SKPD Menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target SKPD antara lain:
   a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT
   b. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
   c. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
   d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

2. Khusus UPTD PPD Bapenda Provinsi Kepulauan Riau
   Tugas dan fungsi pokok yang menjadi tanggungjawab seluruh UPTD PPD

Bapenda Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas yang diberikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah
b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT).
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

3. Anggaran berbasis kinerja menjadi dasar penganggaran pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan telah dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian/bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kepri;

4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu menghadapi wajib pajak yang beraneka ragam karakter, type dari masing-masing masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya sedangkan untuk pegembangan pelayanan yaitu kemudahan layanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena tersebut beberapa langkah-langkah upaya strategi yang dilakukan Bapenda Kepri dalam peningkatan pencapaian target penerimaan antara lain:

a. Komunikasi

Melakukan sosialisasi pajak di segala bidang, yaitu seperti media massa, media sosial, media elektronik bahkan di tempat tempat umum. Bapenda ingin membangun komunikasi tentang betapa pentingnya peran pajak daerah pada susunan Pendapatan Asli Daerah, agar masyarakat atau wajib pajak mengerti dan terdorong untuk membayar pajak.

b. Kerjasama

Menjalin kerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan razia atau operasi bersama lalu-lintas. Operasi ini selain menindak para penunggak pajak (PKB) juga sekaligus merupakan wahana sosialisasi arti pentingnya membayar pajak dan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak. Namun razia ini juga masih belum bisa menjaring semua daerah, contohnya di pulau-pulau/ kecamatan atau desa-desa, sedangkan kegiatan razia hanya dilakukan di beberapa tempat saja. Bapenda Kepri juga bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota terkait opsen pajak, juga dengan finance untuk mengetahui data lengkap dan akurat mengenai pemilik kendaraan, agar dengan mudah bisa mendapatkan alamat pemilik kendaraan bermotor dalam menjalankan tugas penagihan (memberikan peringatan atau teguran secara langsung/tidak langsung kepada wajib pajak).

c. Kebijakan

Dengan berlakunya Opsen pajak mulai 5 Januari 2025 Penetapan target PKB dan BBNKB dalam APBD merupakan pendapatan PKB dan BBNKB yang menjadi hak Provinsi Kepri dengan tarif sebesar 1,05% dan tarif BBNKB 10%. Konsekuensi logis atas penerapan Opsen adalah terjadi penurunan target PKB dan BBNKB tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Adanya kebijakan pengurangan PKB dan BBNKB atas arahan Pemerintah Pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringan dan atau pengurangan terkait penerapan PKB, BBNKB Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menyebabkan menurunnya penerimaan PKB dan

BBNKB dan rendahnya capaian realisasi atas target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025. Program ini akan berlangsung **mulai 1 Juli hingga 15 November 2025** dan berlaku di seluruh wilayah Kepri, sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri, dan PT Jasa Raharja Wilayah Kepri.

Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan berbagai keringanan dan manfaat signifikan bagi masyarakat, di antaranya:

- **Pembebasan 100% Sanksi Administrasi** Seluruh denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dihapuskan selama periode program.
- **Diskon Pokok Pajak Tahun 2025** Wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan akan mendapatkan potongan pokok pajak sebesar 2% khusus untuk tahun pajak 2025.
- **Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II** Seluruh biaya BBNKB II dihapuskan 100% selama program berlangsung.
- **Penghapusan Denda SWDKLLJ** Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelum 2025 juga dihapuskan.
- **Pengurangan Pokok Pajak Secara Berjenjang untuk Tunggakan** Bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, diberikan pengurangan pokok pajak secara bertahap, yaitu:

    - Tunggakan tahun 2024: diskon 10%
    - Tunggakan tahun 2023: diskon 20%
    - Tunggakan tahun 2022: diskon 30%

- Tunggakan tahun 2021: diskon 40%
- Tunggakan tahun 2020: diskon 50%
- Tunggakan tahun 2019 dan sebelumnya: penghapusan 100%

Hal ini dilakukan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang selama ini menunda pembayaran pajak karena kendala ekonomi, sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

Masyarakat dapat memanfaatkan program ini di seluruh kantor Samsat yang tersebar di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau, baik di Samsat Induk, Samsat Corner, Samsat Keliling, Samsat Bergerak, maupun Samsat Pulau. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SIGNAL, e-Samsat, QRIS, dan kanal perbankan lainnya.dalam upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam berberkontribusi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga mampu mendongkrak peningkatan pendapatan daerah. Provinsi Kepulauan Riau, dan diharapkan mampu menggantikan hilangnya penerimaan PKB dan BBNKB akibat adanya kebijakan pengurangan pajak.

d. Sistem Pelayanan

Faktor kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak dan untuk membuat wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak, ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh Bapenda Kepri yaitu:

a. Mengingat masyarakat tidak mau repot atau merasa sulit dalam proses membayar pajak, Bapenda Kepri menambah pelayanannya untuk bisa mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak seperti Samsat Kontainer di lokasi Harbourbay Batuampar dan daerah Batamindo muka kuning;
b. Adanya Call Center dan layanan pengaduan untuk membantu wajib pajak yang memerlukan informasi tentang pajak;
c. Mengoptimalkan pelayanan SAMSAT baik di Samsat Induk, Samsat corner, SAMSAT keliling, Samsat Bergerak, Samsat Pulau, Drive Thru, Jempol Sapri, maupun pembayaran secara online melalui aplikasi SIGNAL, e-Samsat, QRIS, dan kanal perbankan lainnya sehingga wajib pajak yang ingin membayar pajak lebih mudah walaupun berada di luar kota.

BAB
7

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 106.780.871.893,75 atau (89,45%) dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.110.833.568.573,00, dengan sisa lebih pembayaran Rp.4.086.896.679,25.
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 106.774.965.676,80.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.785.768.826,00, termasuk hutang belanja sebesar Rp.1.083.668.630,00., menjadi prioritas Bapenda untuk menyelesaikan pembayarannya pada tahun anggaran 2026.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 108.747.773.287,30.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan

yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Batam, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ABDULLAH, S.SOs, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 197012101993031004

LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. NERACA
3. Laporan Operasional (L-O)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2025